KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KNTI
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

P R O F I L

NELAYAN DI INDONESIA

Potret Dinamika Kehidupan Nelayan Indonesia dari Masa ke Masa



PROFIL

NELAYAN DI INDONESIA

Potret Dinamika Kehidupan Nelayan Indonesia
dari Masa ke Masa



© Yola Sastra/Kompas

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
BEKERJA SAMA DENGAN
KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, DAN
INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE
2026

PROFIL NELAYAN DI INDONESIA
Potret Dinamika Kehidupan Nelayan Indonesia dari Masa ke Masa
© 2026 Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, ulasan, atau kutipan dengan mencantumkan sumber secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengarah:
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M
(Menteri Koordinator Bidang Pangan)

Penanggung Jawab:
Dandi Satria Iswara, S.Ip, M.Si
(Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim)

Tim Penyusun:
Ketua Tim:
1. Rumaksono, S.T. (Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap)
2. Stephanie Juwana, S.H., LL.M. (Direktur IOJI)

Anggota:
Muhamad Suhendar, SE, M.Si
Arkienandia Nityasa Parahita, S.H
Anggraeni Ashory Suryani, S.Pi
Ahmad Iklil Muna, S.T.
Hanan Hana Nadia, S.Si., MBA
Nogie Wikarsa Nugraha Moeis, S.Pi
Adi Setiyo Prayitno, S.Kom
Arnold Caniago, ST

Penyunting:
Muhamad Suhendar, SE, M.Si

Kontributor:
Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)

Pengolahan Data dan Analisis:
Arnold Caniago, S.T., Tim IOJI

Foto Sampul:
Disunting dengan AI

Desain Grafis dan Tata Letak:
Robert Haryanto W.

Cetakan Pertama, 2026
ISBN: 978-xxx-xxxx-xx-x
(diisi setelah ISBN diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI)
Ukuran buku: 14×20 cm
Jumlah halaman: xxx + xxx halaman

Diterbitkan oleh:
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia,10310
Website: https://kemenkopangan.go.id/

SAMBUTAN

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia



Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku **"Profil Nelayan di Indonesia"** dapat diselesaikan dan dihadirkan kepada masyarakat.

Indonesia adalah negara kepulauan yang kehidupan dan masa depannya tidak dapat dipisahkan dari laut. Nelayan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Mereka bukan hanya menangkap ikan, tetapi juga menjadi bagian terdepan dalam penyediaan pangan dan penggerak ekonomi pesisir. Perhatian yang sungguh-sungguh harus diberikan terutama kepada nelayan kecil. Mereka sering menghadapi keterbatasan modal, akses BBM, sarana produksi, teknologi, pasar dan perlindungan

sosial, serta keselamatan kerja. Karena itu, negara harus hadir memperhatikan mereka, melalui kebijakan yang semakin tepat sasaran.

Semangat tersebut sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai agenda strategis nasional. Salah satu program penting bagi masyarakat pesisir adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang diarahkan untuk mendorong transformasi kawasan nelayan melalui peningkatan produktivitas, perbaikan sarana dan penguatan ekonomi masyarakat.

Buku ini menjadi penting karena kebijakan yang baik harus dimulai dari pemahaman yang baik terhadap mereka yang menjadi subjek pembangunan. Ke depan, kita ingin melihat nelayan Indonesia yang semakin maju, produktif, mandiri, terlindungi, dan sejahtera. Menjaga nelayan berarti menjaga laut. Menjaga laut berarti menjaga pangan dan masa depan Indonesia.

Selamat atas terbitnya buku Profil Nelayan di Indonesia. Semoga buku ini memberi manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama kita, untuk mewujudkan nelayan Indonesia yang semakin berdaya dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Koordinator Bidang Pangan
Republik Indonesia
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.



© NaniP/Shuttertock

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si.

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya buku **"Profil Nelayan di Indonesia".** Buku ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai kehidupan nelayan Indonesia.

Nelayan menempati posisi yang sangat penting. Mereka berada pada titik pertemuan antara pemanfaatan sumber daya ikan, penyedia pangan, penggerak ekonomi pesisir, keberlanjutan ekosistem laut, serta kesejahteraan masyarakat. Kami melihat bahwa salah satu tantangan penting saat ini adalah tersedianya data dan informasi yang mampu menggambarkan kondisi nelayan secara lebih lengkap dan utuh. Atas dasar kebutuhan tersebut, Deputi bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menginisiasi kegiatan profiling nelayan. melalui pengumpulan

data terhadap 1.625 responden nelayan yang tersebar di 20 provinsi dan 54 kabupaten/kota, yang dituangkan ke dalam buku ini.

Kami berharap Profil Nelayan di Indonesia tidak hanya menjadi dokumentasi keadaan nelayan pada suatu periode, tetapi menjadi salah satu bahan dalam memperkuat proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang sumber daya maritim. Kami menyadari bahwa buku ini belum dapat menggambarkan seluruh keragaman nelayan Indonesia secara sempurna. Hasil survei di dalamnya bukan dimaksudkan untuk menggantikan statistik nasional, melainkan menjadi pelengkap dan jendela untuk melihat lebih dekat berbagai dimensi kehidupan nelayan yang selama ini belum selalu tergambarkan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), tim penyusun, serta terutama para nelayan yang telah bersedia berbagi data, pengalaman, pandangan, dan cerita kehidupannya.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, akademisi, organisasi nelayan, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memahami nelayan kita. Karena membangun sektor perikanan bukan hanya tentang meningkatkan hasil tangkapan, tetapi tentang memastikan manusia yang hidup dari laut dapat tumbuh, terlindungi, dan sejahtera bersama sumber daya laut yang tetap lestari.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Dandi Satria Iswara, S.Ip., M.Si.

PRAKATA

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap



Rumaksono, S.T.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku **"Profil Nelayan di Indonesia."**

Sebagai Ketua Tim Penyusun, kami melihat bahwa salah satu tantangan dalam perumusan kebijakan nelayan adalah masih tersebarnya data dan informasi mengenai kehidupan mereka. Statistik mengenai jumlah nelayan, produksi, kapal, dan alat tangkap relatif tersedia, tetapi berbagai aspek kehidupan nelayan seperti akses modal, biaya melaut, pemasaran hasil tangkapan, kondisi keluarga, pekerjaan alternatif, kelembagaan, risiko, hingga kemampuan beradaptasi, belum selalu tersaji dalam satu gambaran yang saling terhubung.

Atas dasar itulah, penyusunan buku ini diawali dengan proses penyusunannya, hasil survei kemudian diperkaya dengan statistik resmi pemerintah, literatur, berbagai hasil kajian, serta studi kasus. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bekerja sama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam pengumpulan data di lapangan dan dengan Indonesia

Ocean Justice Initiative (IOJI) dalam pengembangan substansi, interpretasi, analisis, dan penarasian. Buku Profil Nelayan di Indonesia.

Buku ini disusun dengan semangat untuk melihat kehidupan nelayan sebagai satu kesatuan. Persoalan, maka kita perlu melihat keseluruhan sistem kehidupan dan penghidupan yang berada di sekitarnya. Kami menyadari bahwa buku ini belum dapat mewakili seluruh keragaman nelayan Indonesia. Hasil survei bersifat *cross-sectional* dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan statistik nasional, melainkan sebagai pelengkap yang membantu melihat berbagai sisi kehidupan nelayan secara lebih dekat. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini, khususnya pada jajaran Asisten Deputi Pengeloaan Perikanan Tangkap, KNTI dan IOJI.

Kami berharap buku Profil Nelayan di Indonesia ini dapat menjadi bahan pengetahuan sekaligus referensi dalam merumuskan kebijakan yang semakin tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan nelayan.

Semoga buku ini dapat membantu kita mengenal nelayan Indonesia lebih dekat bukan hanya melalui angka, tetapi melalui kehidupan, kerja keras, ketangguhannya serta harapan mereka terhadap masa depan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan
Rumaksono, S.T.
(Ketua Tim Penyusun)

KATA SAMBUTAN

CEO Indonesia Ocean Justice Initiative



Stephanie Juwana, S.H., LL.M.

Gento que estrum, untecus eos pro maximi, qui aut ut facia quuntis alianis unt que maximinci autasin consequos ab ipid quo tes ipsunti onectiis reped quiatur aceaquunt quist, sedi beatenda vent quid quid errore volescimus eaquae nessit, suntem reserum a periaec aeptati atatio mo dolupid qui beaquis volesciassit audanti velenia dolesti asperumquam volo magnat apicius volores di occus, expla derum quo et et et odiscim olupis dem fugiat aligenis dolendi pistium et fugiam aut apera ni apiciis modis voluptati nem fuga. Est lisci bea eosti dolor rescia volori ullame omnimporit lanimos sintum et que dolo ditiunt anditat asimus suntem latemqui conecer epudit voles eius, quatur, que corest ipis pro blaut occuptatis eatur aut invelle caboribus nobit quam, essimustent harum natibus alia nullesequo ma que esequaturit archil in coria exerrorat et voluptatque quia vene num quaeresed quati quatio. Nequo volorundae in cuptam ut ommoles sitatur aut

Gento que estrum, untecus eos pro maximi, qui aut ut facia quuntis alianis unt que maximinci autasin consequos ab ipid quo tes ipsunti onectiis reped quiatur aceaquunt quist, sedi beatenda vent quid quid errore volescimus eaquae nessit, suntem reserum a periaec aeptati atatio mo dolupid qui beaquis volesciassit audanti velenia dolesti asperumquam volo magnat apicius volores di occus, expla derum quo et et et odiscim olupis dem fugiat aligenis dolendi pistium et fugiam aut apera ni apiciis modis voluptati nem fuga. Est lisci bea eosti dolor rescia volori ullame omnimporit lanimos sintum et que dolo ditiunt anditat asimus suntem latemqui conecer epudit voles eius, quatur, que corest ipis pro blaut occuptatis eatur aut invelle caboribus nobit quam, essimustent harum natibus alia nullesequo ma que esequaturit archil in coria exerrorat et voluptatque quia vene num quaeresed quati quatio. Nequo volorundae in cuptam ut ommoles sitatur aut.

Chief Executive Officer
Indonesia Ocean Justice Initative
Stephanie Juwana, S.H., LL.M.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan Profil Nelayan Indonesia utamanya kepada **Bapak Menko Bidang Pangan RI** atas arahan dan dukungannya dalam mendorong tersusunnya profil buku ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia** dan **Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)** atas dukungan, data, informasi, serta berbagai masukan yang memperkaya pembahasan mengenai kondisi dan perkembangan sektor perikanan tangkap di Indonesia.

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada **Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)** yang telah menjadi mitra penting dalam pelaksanaan kegiatan profiling nelayan, khususnya dalam mendukung pengumpulan data di lapangan melalui jaringan dan enumerator di berbagai daerah. Melalui kerja bersama tersebut, survei berhasil menjangkau 1.625 responden nelayan yang tersebar di 20 provinsi dan 54 kabupaten/kota.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada **Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)** atas kontribusi dalam pengembangan substansi, interpretasi hasil survei, analisis, penarasian, serta upaya menempatkan temuan dalam konteks sosial, ekonomi, ekologis, dan kebijakan yang lebih luas.

Penghargaan yang paling utama kami tujukan kepada para nelayan dan keluarga nelayan yang telah bersedia menerima tim di lapangan, meluangkan waktu untuk diwawancarai, para responden survei, enumerator, serta pihak lain yang memberikan dukungan data, informasi, masukan substantif, maupun dukungan selama proses penyusunan buku.

Bagian ini juga dapat secara khusus mengakui kontribusi lembaga pemerintah yang telah menyediakan data dan statistik mengenai nelayan dan perikanan yang turut memberikan dukungan, data, informasi, dokumentasi, maupun pemikiran, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.

Presiden Prabowo Subianto –
Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII, 2026



© Foto Dokumentasi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



DAFTAR ISI

Bab Satu
TENTANG PROFIL NELAYAN DI INDONESIA **1**

Mengapa Profil Nelayan Nusantara Disusun? 2
Ruang Lingkup Penyusunan Buku Profil Nelayan di Indonesia 5
Metodologi Survei 8
Tentang Responden 11
Melihat Nelayan dari Lensa Sistem Perikanan 12

Bab Dua
DEFINISI NELAYAN **17**

Definisi Normatif 18
Definisi Literatur 24
Keragaman dan Kategori Nelayan 26
Karakteristik Kehidupan dan Penghidupan Nelayan 10
Keragaman Pola Mata Pencaharian dan Kehidupan Nelayan 11
12
Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Kehidupan dan Penghidupan Nelayan 13

Bab Tiga
PROFIL INDIVIDU: SIAPA NELAYAN DALAM SURVEI? 1

Usia 1
Jenis Kelamin 21
Pendidikan 34
Status Pernikahan 35
Alasan Menjadi Nelayan 35
Lama Menjadi Nelayan 35
Refleksi 43

Bab Empat
KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PEMASARAN IKAN 6

Pengetahuan dan Keahlian Aktivitas Penangkapan 7
Perahu dan Alat Tangkap 8
Modal dan Input Usaha, dan Pengaruhnya pada Usaha Penangkapan 9
Sumber Daya Ikan dan Kondisi Ekosistem 10
Kegiatan Pascaproduksi, Akses Pasar, dan Pembentukan Pendapatan Nelayan 11

Bab Lima
KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN NELAYAN **1**

Bab Enam
KEHIDUPAN SOSIAL-BUDAYA NELAYAN **1**

Bab Tujuh
ANALISIS KERENTANAN DAN MEMBANGUN RESILIENSI **1**

Kerentanan Nelayan terhadap Perubahan Sosial-Ekologis 35
Faktor Pembentuk Kerentanan Nelayan 35
Penurunan hasil tangkapan *(declining fish catches)* 35
Marginalisasi (marginalization) 43
Ketergantungan yang tinggi terhadap perikanan *(high dependence on fisheries)* 6
Permasalahan lingkungan *(environment issues)* 7
Keterbatasan layanan dan infrastruktur *(poor services and infrastructure)* 8
Paparan terhadap bencana alam *(exposure to natural calamities)* 9

Bab Delapan
REKOMENDASI 1

Temuan Utama 1

Keragaman Nelayan dan Implikasi Kebijakan 21

Rekomendasi 34

PROLOG:

Laut, Pangan, dan Nelayan di Indonesia



© Andri Munazir/iStock

"Di setiap ikan yang sampai ke meja keluarga Indonesia, ada perjalanan panjang yang dimulai dari laut, dan ada nelayan yang berada di balik perjalanan itu".

Sebagai negara kepulauan, hubungan Indonesia dengan laut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, laut telah menjadi ruang penghidupan, jalur perdagangan dan pertukaran antarpulau, sekaligus tempat berkembangnya pengetahuan dan tradisi masyarakat pesisir. Laut bukan sekadar bentang geografis yang memisahkan pulau-pulau, melainkan ruang yang menghubungkan masyarakat, membentuk identitas, dan menopang kehidupan bangsa.

Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah perairan sekitar 6,4 juta km^2 dengan panjang garis pantai sekitar 108.000 km dan lebih dari 17.000 pulau. Karakteristik tersebut menempatkan laut sebagai bagian penting dari kehidupan dan pembangunan nasional. Di dalamnya terdapat sumber daya ikan, ekosistem pesisir dan laut, serta berbagai aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, perdagangan, hingga transportasi dan jasa kelautan.[1]

[1] Data KKP

Laut juga berperan penting dalam sistem pangan Indonesia. Ikan dan hasil perairan lainnya merupakan sumber pangan yang menyediakan protein serta berbagai zat gizi penting bagi masyarakat. Namun, ketersediaan pangan dari laut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya ikan. Di balik setiap hasil perikanan yang dikonsumsi masyarakat terdapat rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penangkapan, pendaratan, penanganan pascapanen, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemasaran. Rangkaian tersebut menghubungkan sumber daya laut dengan kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus menggerakkan perekonomian di berbagai wilayah.

Dalam rantai tersebut, nelayan memiliki peran penting sebagai pelaku yang menghubungkan sumber daya ikan di perairan dengan sistem penyediaan pangan. Kegiatan penangkapan ikan menjadi bagian awal dari proses yang lebih luas, yang kemudian melibatkan awak kapal, pedagang, pengolah, pengangkut, dan pelaku usaha lainnya. Perempuan juga mengambil peran dalam berbagai tahapan, termasuk penyediaan perbekalan, penanganan hasil tangkapan, pengolahan, dan pemasaran. Dengan demikian, kehidupan perikanan tidak hanya berlangsung di laut, tetapi juga di darat, di dalam rumah tangga, dan di sepanjang rantai pasok hasil perikanan.

Oleh karena itu, membicarakan laut dan perikanan tidak cukup hanya dengan melihat besarnya potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia, tetapi juga pada bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan, siapa yang terlibat dalam

pemanfaatannya, bagaimana manfaat ekonomi dan sosialnya didistribusikan, serta sejauh mana keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya dapat dijaga. Laut yang produktif perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan kehidupan masyarakat pesisir yang sejahtera.

Pentingnya Nelayan bagi Indonesia

Setiap hasil tangkapan yang tiba di tempat pendaratan ikan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan sosial yang melibatkan pengetahuan, tenaga, keterampilan, serta pengambilan keputusan. Nelayan tidak hanya berhadapan dengan laut dan sumber daya ikan, tetapi juga dengan perubahan musim, cuaca, kondisi perairan, ketersediaan sarana produksi, kebutuhan modal, hubungan kerja, dan dinamika pasar. Keputusan untuk melaut, menentukan daerah penangkapan, memilih alat tangkap, hingga memasarkan hasil tangkapan merupakan bagian dari rangkaian aktivitas yang memerlukan pengalaman dan kemampuan beradaptasi.

Dalam konteks ketahanan pangan, kontribusi nelayan tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah ikan yang ditangkap. Perikanan skala kecil, misalnya, memiliki kontribusi yang luas terhadap penyediaan pangan, pemenuhan gizi, dan penghidupan masyarakat. Kajian *Illuminating Hidden Harvests* yang disusun oleh Food and Agriculture Organization (FAO), Duke University, dan WorldFish pada 2023 memperkirakan bahwa perikanan

skala kecil menyumbang sedikitnya 40 persen dari total tangkapan perikanan tangkap dunia dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 60,2 juta orang di sepanjang rantai nilai Kajian tersebut juga memperkirakan bahwa sekitar 492 juta orang bergantung, setidaknya sebagian, pada perikanan skala kecil untuk penghidupannya.[2]

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa perikanan skala kecil tidak hanya penting bagi produksi ikan, tetapi juga bagi pemenuhan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Manfaatnya menjangkau lebih luas daripada mereka yang bekerja langsung di laut, karena kegiatan perikanan turut menopang pekerjaan dan penghidupan di sepanjang rantai nilai.

Dengan demikian, mengenal nelayan berarti memahami kehidupan dan penghidupan yang terbentuk dari hubungan antara manusia, sumber daya laut, kegiatan ekonomi, dan lingkungan sosialnya. Pemahaman tersebut diperlukan agar kebijakan kelautan dan perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kondisi kerja, akses terhadap sumber daya, perlindungan sosial, distribusi manfaat ekonomi, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

[2] *Illuminating Hidden Harvests: the Contributions of Small-scale Fisheries to Sustainable Development*

Bagi nelayan, keberlanjutan ekosistem laut bukan persoalan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Kondisi sumber daya ikan dan kesehatan ekosistem secara langsung mempengaruhi ketersediaan pangan, pendapatan, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Nelayan juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terbentuk dari interaksi mereka dengan laut. Pengetahuan tersebut merupakan bagian penting dalam memahami perubahan lingkungan dan praktik pemanfaatan sumber daya. Karena itu, upaya menjaga keberlanjutan laut perlu mengakui peran serta melibatkan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ekosistem tersebut.

Hubungan yang dekat dengan laut juga membuat keberlanjutan ekosistem memiliki arti langsung bagi nelayan. Laut yang sehat bukan semata persoalan konservasi. Kondisi sumber daya dan ekosistem berkaitan dengan pangan, pendapatan, serta keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir. Nelayan dan masyarakat pesisir sebagai bagian penting dalam menjaga lingkungan karena penghidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya laut yang tersedia di dalamnya.

Namun nelayan tidak dapat dipandang sebagai satu kelompok yang seragam. Ada pemilik kapal, nakhoda, anak buah kapal, nelayan dengan kapal kecil maupun lebih besar, nelayan dengan akses pasar yang berbeda, serta rumah tangga dengan sumber penghidupan yang juga berbeda. Karena itu, kondisi ekonomi maupun tingkat kerentanan satu nelayan tidak otomatis sama dengan nelayan lainnya. Gambaran nelayan yang terlalu sering

dilekatkan semata pada kemiskinan dan keterbatasan belum cukup untuk menjelaskan keragaman nelayan di berbagai strata dan wilayah yang terpencar di seluruh Indonesia.

Di berbagai tempat, kita juga menemukan nelayan yang beradaptasi, berinovasi, membangun kelembagaan, menjaga ekosistem, memperbaiki mutu hasil tangkapan, hingga membentuk berbagai akses pasar. Maka mengenal nelayan berarti melihat mereka secara lebih utuh: sebagai penyedia pangan, pelaku ekonomi, pemilik pengetahuan maritim, anggota keluarga dan komunitas pesisir, serta bagian dari perjalanan Indonesia sebagai bangsa maritim.

Mengapa Buku Profil Nelayan di Indonesia Disusun?

Berbagai kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan informasi yang memadai mengenai masyarakat yang menjadi bagian dari sektor tersebut. Informasi mengenai produksi, jumlah kapal, alat tangkap, dan wilayah penangkapan merupakan bagian penting dalam memahami kegiatan perikanan. Namun, informasi tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana nelayan menjalankan kegiatan usahanya, bagaimana hubungan kerja berlangsung, bagaimana pendapatan diperoleh dan digunakan, serta bagaimana rumah tangga menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam praktiknya, kehidupan nelayan dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Ketersediaan sumber daya ikan dan

kondisi cuaca mempengaruhi kemungkinan melaut dan hasil tangkapan. Akses terhadap kapal, alat tangkap, bahan bakar, dan modal menentukan kemampuan nelayan menjalankan kegiatan penangkapan. Sementara itu, hubungan dengan pedagang, mekanisme penjualan, harga ikan, dan akses terhadap pasar turut mempengaruhi nilai ekonomi yang diterima nelayan. Kondisi tersebut kemudian berhubungan dengan pendapatan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, serta kemampuan menghadapi berbagai risiko.

Di sisi lain, informasi mengenai nelayan masih menghadapi tantangan dalam hal cakupan dan keterwakilan. Keragaman kegiatan perikanan, karakteristik wilayah, serta keterlibatan berbagai pelaku di sepanjang rantai nilai menyebabkan sebagian aspek kehidupan nelayan tidak selalu tercermin dalam statistik yang tersedia. Hal ini juga menjadi perhatian dalam kajian FAO, yang menunjukkan bahwa kontribusi perikanan skala kecil, termasuk kegiatan subsistensi, pekerjaan perempuan, dan berbagai aktivitas informal, masih kerap tidak tercatat secara memadai dalam sistem statistik dan proses pengambilan kebijakan.

Dalam konteks tersebut, buku **Profil Nelayan di Indonesia** disusun untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dan kondisi nelayan berdasarkan data yang dihimpun melalui survei di sejumlah wilayah di Indonesia. Buku ini berupaya melihat kehidupan nelayan secara lebih menyeluruh, dengan memperhatikan keterkaitan antara karakteristik individu, kegiatan penangkapan dan pemasaran hasil perikanan, kondisi rumah tangga, serta kerentanan dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Buku ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh nelayan di Indonesia atau menghasilkan satu kesimpulan mengenai kondisi nelayan secara nasional. Gambaran yang disajikan terbatas pada nelayan yang tercakup dalam survei, sehingga hasilnya perlu dibaca dengan memperhatikan cakupan dan karakteristik data yang tersedia.

Survei yang menjadi dasar buku ini diinisiasi oleh **Kementerian Koordinator Bidang Pangan** dan dilaksanakan dengan dukungan **Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).** Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bekerja sama dengan **Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)** untuk mengembangkan hasil survei tersebut menjadi sebuah publikasi.

Buku ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai data mengenai nelayan yang telah tersedia. **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pusat Statistik (BPS),** serta lembaga pemerintah lainnya telah menghasilkan berbagai statistik dan informasi mengenai rumah tangga nelayan maupun sektor perikanan, dengan cakupan, tujuan, metode, dan unit analisis yang berbeda. Dalam konteks tersebut, buku

Profil Nelayan di Indonesia diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu sumber informasi yang melengkapi data yang telah tersedia, dengan menggunakan data survei yang menjadi dasar penyusunan buku ini.

Posisi tersebut penting untuk dipahami agar temuan dalam buku ini dibaca sesuai dengan cakupan datanya. Buku ini memberikan gambaran mengenai karakteristik dan kondisi nelayan yang tercakup dalam survei, tetapi tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh nelayan di Indonesia. Dengan demikian, temuan dalam buku ini perlu dibaca dan ditelaah bersama dengan berbagai sumber data lainnya, sekaligus dapat menunjukkan aspek-aspek kehidupan nelayan yang masih perlu dipahami lebih lanjut.

Ruang Lingkup Penyusunan Buku Profil Nelayan di Indonesia

Buku Profil Nelayan di Indonesia disusun untuk memberikan gambaran mengenai nelayan yang tercakup dalam survei dengan menempatkan nelayan sebagai bagian dari sistem perikanan, serta melihat bagaimana kondisi individu, kegiatan perikanan, kehidupan rumah tangga, dan lingkungan sosial-ekologis saling berkaitan dalam membentuk kehidupan dan penghidupan nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada karakteristik individu nelayan, tetapi juga mencakup kondisi yang memengaruhi kegiatan perikanan, distribusi manfaat ekonomi, serta kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Ruang lingkup pembahasan buku ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. **Definisi, keragaman, dan karakteristik nelayan,** mencakup definisi nelayan dalam peraturan perundang-undangan dan literatur, kategori dan keragaman nelayan, serta karakteristik kehidupan dan penghidupan yang membedakan kondisi dan kebutuhan nelayan. Pembahasan ini menjadi dasar untuk memahami bahwa nelayan bukan kelompok yang homogen. Perbedaan skala usaha, peran dalam kegiatan perikanan, karakteristik wilayah, dan kondisi sosial-ekonomi turut membentuk pengalaman serta kebutuhan yang beragam.
2. **Profil individu nelayan,** mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, alasan menjadi nelayan, dan lama menjalani profesi sebagai nelayan. Pembahasan ini memberikan gambaran mengenai karakteristik responden

dan keragaman latar belakang yang mempengaruhi pengalaman serta posisi nelayan dalam sistem perikanan.

3. **Kegiatan penangkapan dan pemasaran hasil perikanan,** mencakup pengetahuan dan keterampilan nelayan, sarana dan prasarana penangkapan, modal dan input usaha, kondisi sumber daya ikan dan ekosistem, serta kegiatan pascaproduksi, akses pasar, dan pembentukan pendapatan nelayan. Aspek ini melihat bagaimana kegiatan penangkapan berlangsung dan bagaimana hubungan nelayan dengan sumber daya ikan serta pelaku lain dalam rantai nilai perikanan mempengaruhi hasil dan manfaat ekonomi yang diperoleh.
4. **Kehidupan dan penghidupan rumah tangga nelayan,** mencakup kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, sumber dan diversifikasi mata pencaharian, kondisi hunian dan akses terhadap layanan dasar, serta pembagian peran dalam rumah tangga. Pembahasan ini menempatkan rumah tangga sebagai bagian penting dalam memahami bagaimana pendapatan dari kegiatan perikanan digunakan, bagaimana kebutuhan sehari-hari dipenuhi, dan bagaimana keluarga menghadapi perubahan kondisi penghidupan.
5. **Kehidupan sosial-budaya nelayan,** mencakup relasi sosial, identitas dan pengakuan terhadap profesi nelayan, pengetahuan dan praktik lokal, adat istiadat, serta kelembagaan dan dukungan sosial yang berkaitan dengan kehidupan nelayan. Aspek ini turut melihat bagaimana hubungan sosial, nilai budaya, dan kelembagaan membentuk

praktik perikanan serta memengaruhi akses dan posisi nelayan dalam masyarakat.

6. **Analisis kerentanan dan resiliensi nelayan,** yang mengintegrasikan temuan dari berbagai aspek untuk mengidentifikasi tekanan dan risiko yang dihadapi nelayan, faktor-faktor yang membentuk kerentanan, serta kapasitas nelayan dan rumah tangga dalam merespons perubahan. Analisis ini mencakup keterkaitan antara perubahan sumber daya ikan dan lingkungan, kondisi usaha dan pasar, ketergantungan terhadap perikanan, serta kondisi sosial-ekonomi dan kelembagaan. Berdasarkan keterkaitan tersebut, buku ini membahas berbagai upaya yang dapat mendukung resiliensi nelayan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta keberlanjutan perikanan. Dengan demikian, kerentanan tidak dipahami semata-mata sebagai akibat dari tekanan lingkungan atau perubahan kondisi ekonomi, tetapi juga sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan nelayan dan rumah tangganya untuk bertahan, beradaptasi, dan memulihkan penghidupan.

Ruang lingkup tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan setiap aspek sebagai bagian yang berdiri sendiri. Berdasarkan data survei, buku ini juga membaca keterkaitan antar aspek melalui analisis perbandingan dan *cross-tabulation.* Analisis tersebut digunakan untuk melihat variasi kondisi menurut karakteristik tertentu, seperti posisi nelayan dalam usaha penangkapan, skala usaha, wilayah, maupun kondisi rumah tangga.

Pembahasan dalam buku tetap dibatasi oleh cakupan dan karakteristik data survei. Karena itu, tidak seluruh aspek dalam sistem perikanan dapat dijelaskan secara sama mendalam, dan analisis yang disajikan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat yang tidak dapat ditunjukkan oleh data. Kerangka sistem perikanan digunakan terutama untuk membantu membaca hubungan antarkomponen dan menempatkan temuan survei dalam konteks kehidupan dan penghidupan nelayan.

Metodologi Survei

Buku ini disusun berdasarkan hasil survei nelayan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik dan kondisi nelayan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator dengan dukungan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dengan melibatkan 1.625 responden yang tersebar di 19 provinsi dan 54 kabupaten/kota. Survei dilaksanakan pada 11 November–4 Desember 2025.

Survei diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dengan KNTI, dengan lokasi pengumpulan data ditentukan pada wilayah yang memiliki keterwakilan anggota KNTI. Responden nelayan pada masing-masing lokasi kemudian dipilih secara acak *(random sampling).* Wawancara dilakukan secara tatap muka, baik di kediaman responden maupun di lokasi yang biasa menjadi pangkalan atau tempat berkumpul nelayan. Setiap wawancara menggunakan instrumen yang terdiri atas 69 pertanyaan dan berlangsung selama kurang lebih 90–120 menit.

Responden diwawancarai menggunakan instrumen yang terdiri atas 69 pertanyaan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan aktivitas nelayan, baik yang berkaitan dengan karakteristik individu dan rumah tangga maupun kegiatan penangkapan ikan dan usaha perikanan. Instrumen survei juga mencakup responden perempuan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dari 1.625 responden, terdapat 17 nelayan perempuan

(1,05%) dan 1.608 nelayan laki-laki (98,95%). Komposisi ini perlu dibaca secara hati-hati dan tidak serta-merta dipahami sebagai gambaran proporsi nelayan perempuan dan laki-laki secara nasional, mengingat survei ini tidak dirancang untuk menghasilkan estimasi proporsi nelayan berdasarkan gender pada tingkat nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei satu waktu *(cross-sectional survey)* yang memberikan gambaran mengenai kondisi responden pada periode tertentu. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik dan kondisi responden pada suatu waktu tertentu, tetapi tidak dapat menjelaskan perubahan kondisi dari waktu ke waktu maupun hubungan sebab-akibat di antara berbagai kondisi yang ditemukan.

Cakupan informasi yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografis dan sosial responden, kondisi rumah tangga nelayan, kegiatan dan usaha penangkapan, kepemilikan serta penggunaan sarana produksi, akses terhadap sarana dan prasarana pendukung, pola pemasaran hasil tangkapan, serta aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan nelayan. Keragaman informasi tersebut menjadi dasar bagi penyusunan profil dalam buku ini.

Data survei terutama menggambarkan kondisi dan pengalaman responden berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun pada saat survei. Data tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan proses, konteks, atau faktor yang membentuk

kondisi tersebut. Oleh karena itu, pembacaan terhadap data dalam buku ini perlu ditempatkan dalam kerangka analitis yang memungkinkan berbagai temuan dibaca secara lebih utuh dan dalam keterkaitannya satu sama lain.

Selain data survei, penyusunan buku ini juga menggunakan literatur akademik, data dan informasi dari sumber pemerintah, serta sumber relevan lainnya untuk memberikan konteks terhadap temuan yang diperoleh. Penggunaan sumber-sumber tersebut tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi hasil survei, tetapi untuk membantu menempatkan temuan dalam konteks yang lebih luas dan mengidentifikasi aspek yang tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan data survei.

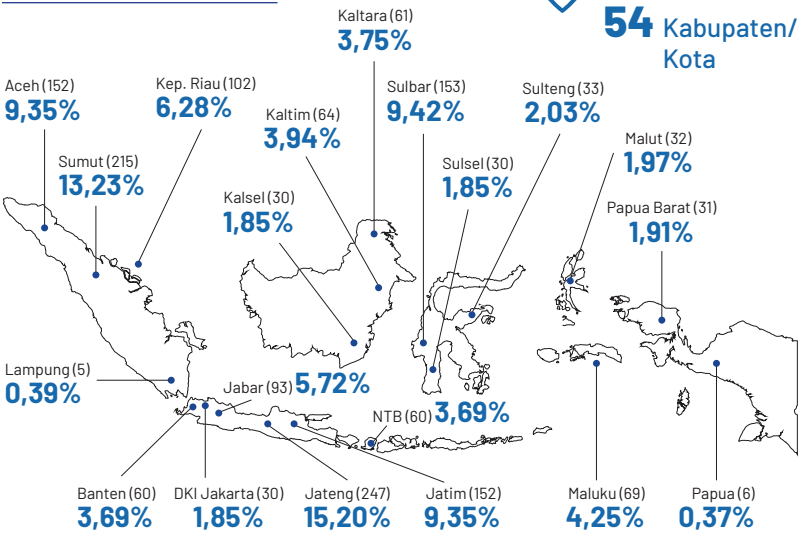
Dalam proses penyusunan buku, data dan bahan awal hasil survei yang dikembangkan melalui proses yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan selanjutnya ditelaah dan dikembangkan kembali secara substantif. IOJI berkontribusi dalam proses penelaahan, penyuntingan, dan pengayaan substansi buku, terutama dalam membantu menyusun narasi dan konteks atas data yang tersedia.

Pembacaan dalam buku ini kemudian diarahkan pada beberapa pertanyaan utama: siapa nelayan yang menjadi responden; bagaimana mereka menjalankan kegiatan perikanan; sumber daya, sarana produksi, dan pasar seperti apa yang membentuk kegiatan tersebut; bagaimana kegiatan perikanan berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan rumah tangga; serta bagaimana nelayan menghadapi berbagai ketidakpastian dan

perubahan dalam lingkungan ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk membaca data survei secara lebih terhubung, sekaligus untuk melihat keragaman kondisi nelayan dan aspek-aspek yang masih memerlukan pendalaman melalui penelitian atau sumber data lainnya.

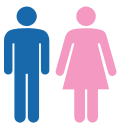
Distribusi Responden

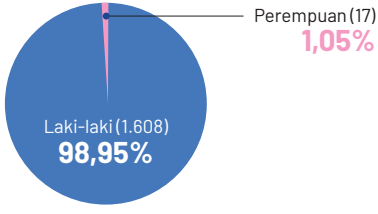
20 Provinsi
54 Kabupaten/ Kota



Jumlah Responden

±1.625
Nelayan





Tentang Responden

Berdasarkan ukuran kapal yang digunakan, responden dalam survei ini didominasi oleh nelayan skala kecil. Sebanyak 1.027 responden (80,99%) menggunakan kapal berukuran kurang dari 5 GT, sementara 19,01% lainnya menggunakan kapal berukuran 6 GT hingga lebih dari 30 GT. Komposisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pembahasan buku ini. Dengan mempertimbangkan dominasi tersebut, pembahasan dalam buku ini akan lebih banyak diarahkan pada nelayan skala kecil, tanpa mengesampingkan keberadaan nelayan dengan skala usaha yang lebih besar dalam cakupan survei. Fokus ini selanjutnya digunakan untuk melihat karakteristik, kondisi penghidupan, kegiatan perikanan, serta berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi nelayan skala kecil dalam konteks sosial, ekonomi, dan ekologis.

Melihat Nelayan dari Lensa Sistem Perikanan

Kondisi nelayan tidak dapat dipahami hanya dengan melihat karakteristik individu, jumlah hasil tangkapan, pendapatan, atau kepemilikan sarana produksi secara terpisah. Kehidupan dan penghidupan nelayan terbentuk melalui berbagai proses yang saling berkaitan, mulai dari kapasitas dan pengetahuan nelayan, ketersediaan serta penguasaan nelayan terhadap sarana produksi, akses terhadap sumber daya ikan, kegiatan penangkapan, hingga proses pascaproduksi, pemasaran, dan pendapatan yang diperoleh. Seluruh proses tersebut pada

akhirnya berhubungan dengan kondisi rumah tangga nelayan, sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola tempat kegiatan perikanan berlangsung.

Dalam buku ini, kerangka *fishery system* atau sistem perikanan digunakan sebagai cara untuk membaca nelayan dan berbagai temuan mengenai kehidupan mereka sebagai bagian dari suatu sistem yang saling terhubung. Kerangka ini membantu menempatkan setiap aspek yang dibahas dalam buku, mulai dari profil individu, kegiatan penangkapan dan pemasaran, kehidupan rumah tangga, kerentanan dan resiliensi, hingga kehidupan sosial dan budaya, dalam hubungan yang lebih utuh.

Secara sederhana, sistem tersebut dapat dilihat melalui keterkaitan antara:



Rangkaian tersebut berlangsung dalam konteks ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang turut membentuk kondisi dan pilihan yang tersedia bagi nelayan.

Namun demikian, hubungan dalam sistem perikanan tidak selalu berlangsung secara linear maupun satu arah. Setiap komponen dapat mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh komponen lainnya. Kapasitas modal, misalnya, dapat menentukan jenis perahu dan alat tangkap yang dapat digunakan, yang kemudian mempengaruhi jangkauan wilayah tangkap dan jenis hasil tangkapan. Pada sisi lain, perubahan kondisi sumber daya ikan, cuaca, biaya operasi, atau harga hasil tangkapan dapat memengaruhi pendapatan dan keputusan rumah tangga. Kondisi rumah tangga itu sendiri juga dapat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan perikanan, misalnya melalui keputusan untuk mencari pekerjaan tambahan atau melakukan diversifikasi mata pencaharian.

Dengan demikian, posisi nelayan dalam sistem perikanan tidak seragam. Perbedaan kepemilikan sarana produksi, posisi dalam hubungan kerja, kapasitas, akses terhadap sumber daya, lokasi, jenis usaha, maupun kondisi rumah tangga dapat menghasilkan pengalaman dan tingkat kerentanan yang berbeda. Pemilik kapal, nakhoda, dan anak buah kapal, misalnya, berada dalam sistem produksi yang sama tetapi memiliki akses, tanggung jawab, manfaat, dan risiko yang berbeda. Demikian pula nelayan yang mengandalkan penangkapan sebagai sumber penghidupan utama dapat memiliki kondisi yang berbeda dengan nelayan yang menggabungkan penangkapan dengan pekerjaan lain.

Kerangka ini karena itu menjadi benang merah dalam membaca berbagai bagian buku. Profil individu pada Bagian 3 tidak hanya menggambarkan siapa respondennya, tetapi menjadi titik awal untuk memahami kapasitas dan posisi mereka dalam kegiatan perikanan. Bagian 4 kemudian melihat bagaimana kapasitas tersebut berhubungan dengan sarana produksi, sumber daya, kegiatan penangkapan, serta pemasaran. Bagian 5 melihat bagaimana hasil dari kegiatan tersebut berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan rumah tangga. Sementara itu, Bagian 6 dan Bagian 7 memperluas pembacaan dengan melihat kerentanan, resiliensi, relasi sosial, pengetahuan, dan praktik budaya yang turut membentuk kehidupan nelayan.

Kerangka *fishery system* dalam buku ini bukan dimaksudkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat secara statistik. Data survei yang digunakan merupakan data potret pada satu periode dan memiliki keterbatasan dalam menjelaskan proses maupun hubungan kausal secara mendalam. Oleh karena itu, kerangka ini digunakan terutama untuk membaca keterkaitan antara temuan, menempatkan data dalam konteksnya, serta menghindari pembacaan terhadap kondisi nelayan secara terpisah-pisah.

Secara sederhana, hubungan antarkomponen dalam sistem perikanan yang menjadi kerangka baca buku ini dapat digambarkan sebagai berikut:

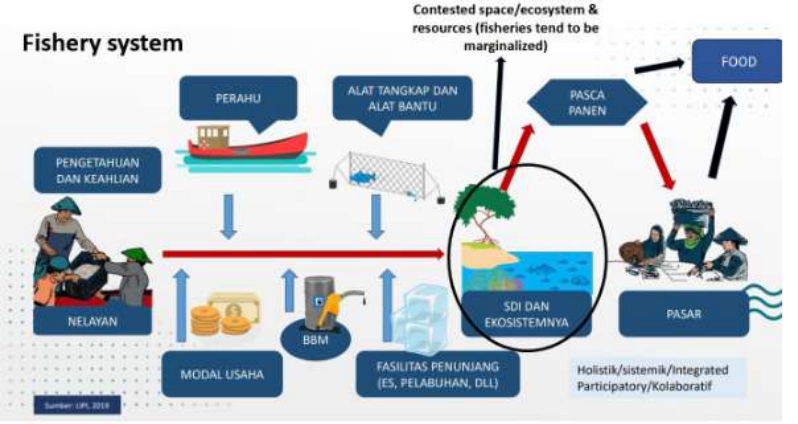


Diagram tersebut menjadi rujukan untuk membaca bagian-bagian berikutnya. Tidak setiap komponen dalam sistem dapat dijelaskan secara utuh melalui data survei ini. Karena itu, pembahasan dan analisis dalam buku ini juga menggunakan literatur dan sumber data lain yang relevan untuk memberikan konteks, sementara keterbatasan data survei tetap menjadi bagian penting dalam menafsirkan setiap temuan.



© Mande Hanifah/Facebook

Figur Nelayan menurut Arus Informasi yang Berkembang

KERENTANAN EKONOMI TINGGI
Banyak rumah tangga nelayan berada dekat atau di bawah garis kemiskinan.

PERAN PENTING KELUARGA
Istri dan anggota keluarga sering terlibat dalam aktivitas usaha nelayan.

PENDAPATAN TAK MENENTU
Bergantung pada musim, pada musim paceklik penghasilan dapat turun drastis.

KETERGANTUNGAN PADA PEMODAL
Akses sumber daya dan pasar terbatas menyebabkan ketergantungan pada Pemodal/Tengkulak/Pemasar.

AKSES SUMBER DAYA TERBATAS
Akses terhadap armada, alat tangkap, teknologi, dan pembiayaan yang terbatas.

RISIKO USAHA TINGGI
Karena faktor alam, perubahan cuaca, fluktuasi harga, dan tekanan lingkungan perairan.

MOBILITAS TINGGI
Seringkali berpindah-pindah tempat mencari ikan untuk memaksimalkan hasil tangkapan.





Sumber: disarikan dari berbagai pemberitaan media, artikel, hasil kajian dan opini selama 20 tahun terakhir, 2026
(Foto nelayan: Chanzj/Pixabay)



BERUSIA PARUH BAYA

Rata-rata kisaran usia 40-60 tahun.

TANGGUH DAN ADAPTIF

Kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan pesisir dan laut yang keras dan dinamis.

IKATAN KUAT BUDAYA BAHARI

Memiliki tradisi dan ritual yang mencerminkan hubungan erat dengan laut.

TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH

Didominasi lulusan SD, dimana berkisar 80% hanya menamatkan SMP atau lebih rendah.

PENGETAHUAN TRADISIONAL

Memiliki dan mengandalkan pengetahuan ekologis lokal yang diwariskan turun-temurun.

DOMINASI NELAYAN KECIL

Sebagian besar menggunakan kapal berukuran di bawah 10 GT.

BERGANTUNG PADA KOMUNITAS

Solidaritas tinggi dan hidup dalam komunitas yang kuat dan saling mendukung dalam mencari nafkah.

BAB SATU:

1 Menjemput Fakta di Ujung Ombak



© Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

"Melampaui deru gelombang dan catatan sejarah, bab ini meletakkan kembali nelayan sebagai jantung maritim Nusantara dan pilar utama ketahanan pangan yang hidupnya berjalin erat dengan semesta".

1.1. Nelayan dan Identitas Bahari

Jauh sebelum perbatasan negara ditarik di atas peta, lautan Nusantara telah menjadi rumah pertama bagi denyut nadi peradaban kita. Jejak ini terekam abadi sejak era prasejarah, ketika nenek moyang kita memahat batang kayu menjadi perahu bercadik dan mulai membaca rasi bintang untuk menaklukkan samudra. Keberanian bahari itu kemudian mekar menjadi tulang punggung kejayaan Nusantara, menggerakkan armada tangguh Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai jalur rempah serta menjadikan nelayan dan pelaut kita sebagai penguasa lautan yang disegani dunia.

Namun, roda sejarah berputar. Di bawah cengkraman kolonialisme, kedaulatan maritim itu perlahan direnggut; nelayan yang dulunya penguasa samudra perlahan terpinggirkan, dipaksa surut menjadi kelompok pesisir yang harus bergulat dengan monopoli, kemiskinan, dan pembatasan ruang.

Kini, melintasi abad yang terus berganti, nelayan Indonesia menolak menyerah pada zaman. Di era digital ini, mereka menjelma menjadi perpaduan yang menakjubkan antara kearifan masa lalu dan adaptasi masa kini, di mana insting

membaca angin dan arus laut kini berpadu dengan koordinat GPS, layar ponsel pintar, dan sinyal satelit di tengah perairan lepas. Sejarah nelayan kita sejatinya bukanlah sekadar catatan masa lampau, melainkan sebuah epik tentang manusia-manusia tangguh yang tak pernah berhenti berlayar untuk menyambung hidup dan menjaga kedaulatan pangan bangsa.

Bagaimana dengan asal muasal nelayan di Nusantara? Bagaimana riwayat perjalanannya dari waktu ke waktu? Dirangkum dari berbagai referensi, asal mula dan episode per episode eksistensi nelayan Nusantara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Era Prasejarah

Bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Austronesia yang datang ke Nusantara sekitar 4.000 tahun lalu telah memiliki kemampuan navigasi dan teknik penangkapan ikan yang cukup maju (UNESA, 2026). Nelayan pada masa ini menggunakan alat sederhana seperti tombak, kail dari tulang, jaring serat tumbuhan, dan perangkap bambu. Penangkapan ikan menggunakan perahu lesung *(dugout canoe)* yang dibuat dari batang kayu, dengan aktivitas penangkapan terbatas di perairan pantai, estuari, dan sungai. Secara umum, hasil tangkapan digunakan untuk konsumsi sendiri (subsisten), akan tetapi juga telah mulai memperdagangkan antar komunitas, yang menandai awal ekonomi maritim.

2. Era Kerajaan Nusantara

Di era kerajaan-kerajaan nusantara, nelayan digambarkan sebagai penangkap ikan tradisional yang bergantung pada pengetahuan lokal dan alat sederhana seperti perahu kecil, jaring, dan pancing untuk mencari nafkah, serta berperan penting dalam pendistribusian komoditas laut dan mendukung kekuatan maritim kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Perahu bercadik yang khas menjadi simbol kecanggihan teknologi maritim awal. Teknologi perahu bercadik (penyeimbang di kanan-kiri) sangat stabil, hal tersebut menjawab tantangan geografis perairan nusantara, bahkan memungkinan menjelajahi samudra hingga Madagaskar, sebagaimana tergambar jelas pada relief Candi Borobudur (sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi).



Replika kapal Jawa dari relief Candi Borobudur
© Mr. J.B. Gardner/The Board of Trustees of the Science Museum

Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi laut, cuaca, dan tanda-tanda alam. Hubungan erat nelayan dengan laut melahirkan kearifan lokal yang membentuk cara mereka berinteraksi, mengelola, dan bersyukur atas hasil laut. Karena itulah, dalam budaya tradisional, nelayan dihormati sebagai penjaga kehidupan

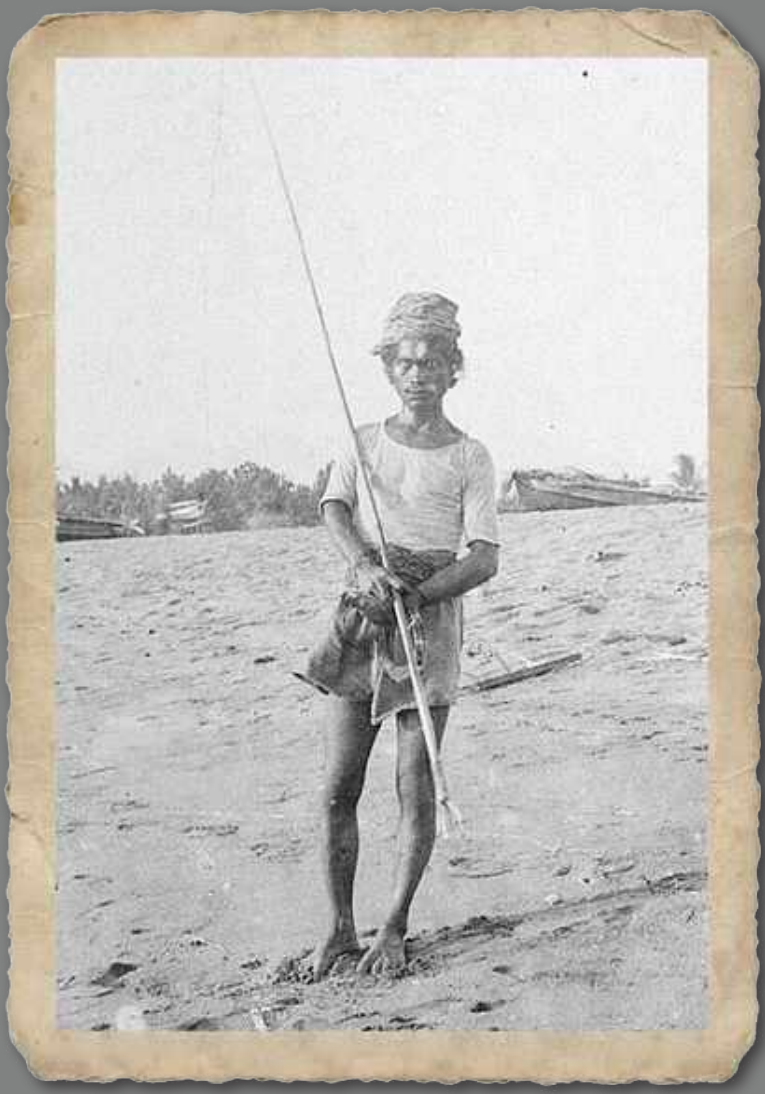
laut dan pelindung alam bawah laut. Pada masa ini pula, nelayan mulai berinteraksi dengan pedagang asing, yang membawa pengaruh teknologi dan budaya baru. Hasil-hasil laut seperti ikan asin, terasi, garam, dan mutiara menjadi komoditas perdagangan.

3. Era Kolonialisme

Di era kolonial, kehidupan nelayan Indonesia ditandai oleh eksploitasi sumber daya laut untuk tujuan komersial, di mana sistem kapitalis dan kebijakan kolonial mengubah pola penangkapan ikan tradisional serta menimbulkan dampak sosial ekonomi yang rentan pada komunitas nelayan. Nelayan masih menggunakan perahu dan metode tradisional mereka seperti kolek, tembon, mayang, dan janggolan untuk berlayar di zona tangkap tradisional, namun keberadaan mereka tergeser dari peran utama dalam pengambilan keputusan terkait laut. Yuwono (dalam merdeka.com, 03-01-2024) dalam tulisannya yang mengangkat kehidupan nelayan di Pekalongan di masa kolonial, mengungkapkan bahwa pada saat itu, masuknya modal asing, perusahaan asing, serta kapitalisme modern mendorong munculnya pranata ekonomi baru di kalangan masyarakat nelayan.

Salah satu biang masalah dari kondisi baru tersebut adalah munculnya para pemungut cukai yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mereka merangkap menjadi rentenir, menyediakan uang pinjaman yang diputar di tengah

masyarakat nelayan, sekaligus memonopoli perdagangan garam. Masalah itu semakin diperparah dengan menurunnya populasi ikan di Laut Jawa secara bertahap. Pada tahun 1865, estimasi tangkapan ikan di pantai utara Jawa sekitar 258.502 ton, tapi pada tahun 1904 menyusut jadi hanya 77.000 ton saja. Widodo dalam Krisdamarjati (2022) menyebutkan bahwa program pengelolaan perikanan dan pengentasan nasib nelayan di Hindia Belanda sudah dilakukan sejak 1901, kemudian membentuk komite *Mindere Welvaart Onderzoek* pada 1904. Sejumlah rekomendasi diberikan lembaga ini, mulai dari memberi pinjaman modal usaha, menyediakan peralatan nelayan, memberi pelatihan nelayan, memperbaiki sistem distribusi, menerapkan metode tangkap ikan dengan mekanisasi, serta menyediakan infrastruktur pendukung ekonomi perikanan. Salah satu bentuk kebijakan yang monumental dari program ini adalah pembangunan dua pasar ikan di Batavia, yaitu di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priok. Tujuan pembangunan tempat jual-beli ikan ini agar nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan harga yang layak. Di era pendudukan Jepang, lembaga tersebut berubah menjadi Jawatan Perikanan Laut *(Kaken Gyogo Kenkyu Sao).* Jepang juga membentuk perkumpulan-perkumpulan nelayan dalam wadah Koperasi Perikanan Laut *(Gyogo Kumiai).* Namun, tugas utama jawatan dan koperasi perikanan waktu itu lebih untuk memenuhi kebutuhan logistik armada perang Jepang (Krisdamarjati, 2022).



Potret Nelayan Tradisional Masa Hindia Belanda
Credit: Arsip Achmad Sunjayadi/Kompas ID

4. Era Awal Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, mulai diupayakan perbaikan, dimana pemerintah mulai memberikan perhatian kepada nelayan. Pada pertengahan 1950-an, pemerintah Indonesia mulai memodernisasi armada perikanan dengan memesan kapal motor di galangan kapal di Juwana, tetapi baru pada akhir 1950-an gelombang mekanisasi massal pertama terjadi di Indonesia. Melalui Dinas Perikanan, pemerintah mensponsori produksi besar-besaran kapal kayu penangkap ikan dengan panjang 12 sampai 14 meter dan lebar 4 meter, yang digerakkan oleh mesin buatan Jepang. Perahu-perahu tersebut kemudian disediakan untuk para nelayan melalui program kredit. Selain itu, periode ini juga ditandai dengan berkembangnya koperasi-koperasi perikanan yang memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat. Gagasan mengubah organisasi nelayan warisan penjajahan Jepang menjadi koperasi datang dari Muhammad Hatta (Setiawan, 2022).

Oleh Bung Karno, kaum nelayan disebut sebagai salah satu penopang kemandirian ekonomi negara atau "Saka Guru Revolusi". Penghargaan tertinggi pemerintah kepada kaum nelayan kala itu dinyatakan dengan menetapkan tanggal 6 April sebagai Hari Nelayan Nasional pada 1961. Artikel Kompas edisi 3 November 1965 menjabarkan beberapa program perikanan nasional yang digulirkan pada era Orde Lama. Salah satunya adalah membentuk Departemen

Perikanan pada 1964. Selanjutnya dibentuk juga Perusahaan Negara Perikani yang ditugasi untuk mendorong nelayan supaya dapat menangkap ikan sebanyak-banyaknya (Krisdamarjati, 2022).

5. Era Orde Baru

Pada 1970-an di masa pemerintah Orde Baru, dicanangkan program Revolusi Biru. Program ini bertujuan mendorong modernisasi nelayan dengan motorisasi perahu serta melengkapinya dengan peralatan penangkap ikan yang mutakhir. Target dicanangkannya program ini untuk meningkatkan kapasitas tangkapan nelayan tradisional. Berdasarkan data statistik dari BPS, pada 1970 jumlah ikan laut yang dapat diangkat mencapai 807.000 ton, sedangkan pada 1980, nelayan Indonesia mampu menjala 1,4 juta ton ikan laut. Artinya, dalam kurun satu dekade terjadi peningkatan produktivitas nelayan sebesar 42 persen. Cita-cita pemerintahan Orde Baru untuk meningkatkan tangkapan sumber daya laut pada era 1980-an diupayakan dengan mengundang pelaku perikanan industri berskala besar. Kebijakan ini ditandai dengan kehadiran kapal-kapal asing yang mengambil ikan di perairan Indonesia sebagai bagian dari kebijakan penanaman modal asing (PMA) di era pemerintahan Presiden Soeharto (Krisdamarjati, 2022). Alasan utama yang melandasi kebijakan itu adalah masih minimnya pemanfaatan potensi perikanan Indonesia di ZEE. Potensi perikanan baru dimanfaatkan 1 persen oleh nelayan

Indonesia yang mayoritas merupakan nelayan tradisional. Untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada, diperlukan campur tangan nelayan pelaku perikanan industri (Kompas, 3/1/1984). Produksi perikanan meningkat signifikan, tetapi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan nelayan kecil. Banyak nelayan tradisional yang kesulitan bersaing dengan armada yang lebih besar dan modal yang lebih kuat.

6. Era Reformasi dan Desentralisasi

Perubahan politik setelah 1998 membawa perubahan dalam tata kelola perikanan dan pengelolaan sumber daya laut. Desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sektor perikanan, sehingga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis kelautan. Namun, perluasan kewenangan tersebut tidak selalu diikuti dengan kapasitas pengawasan dan pengelolaan sumber daya yang memadai. Pada periode ini, praktik penangkapan ikan ilegal *(illegal fishing)* dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan dan lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah menjadi tantangan dalam pengelolaan perikanan. Nelayan kecil sering menjadi pihak yang paling terdampak dan semakin rentan karena harus menghadapi persaingan akses terhadap wilayah tangkap, sumber daya ikan, teknologi, hingga permodalan. Selain itu, globalisasi membawa perubahan dalam pasar perikanan. Permintaan ekspor

meningkat, tetapi juga diiringi dengan standar kualitas yang lebih ketat. Nelayan dituntut untuk beradaptasi dengan sistem yang semakin kompleks, termasuk dalam hal rantai pasok dan sertifikasi produk (UNESA, 2026).

7. Era Digital/Kekinian

Kehidupan nelayan Indonesia berada di persimpangan antara peluang dan tantangan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan berbagai kemudahan, seperti penggunaan GPS, aplikasi cuaca, dan sistem informasi perikanan. Teknologi ini membantu nelayan meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Namun di sisi lain, perubahan iklim menjadi ancaman serius. Pola cuaca yang tidak menentu, naiknya suhu laut, dan kerusakan ekosistem seperti terumbu karang berdampak langsung pada hasil tangkapan. Nelayan harus menghadapi ketidak-pastian yang semakin tinggi dalam aktivitas mereka. Selain itu, isu kesejahteraan masih menjadi perhatian utama. Banyak nelayan yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketergantungan pada tengkulak masih menjadi masalah struktural yang sulit diatasi (UNESA, 2026).

Namun, terdapat langkah terobosan yang mulai dirintis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui pendekatan mengubah wajah kampung nelayan, yang diawali dengan program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) pada 2022.

Kalaju bertransformasi menjadi Kampung Nelayan Modern (Kalamo) dengan reorientasi pendekatan yang lebih holistik, yang memadukan perbaikan lingkungan nelayan dengan produktivitas usaha nelayan. Kiranya, keberhasilan Kalamo menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto, selanjutnya mengarahkan untuk mereplikasinya secara besar-besaran sebagai program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dimulai dengan pembangunan di 65 lokasi di seluruh Indonesia pada 2025. KKP menargetkan hingga 2029 akan menyelesaikan 5.000 KNMP.

Foto Kampung Nelayan Merah Putih di Konawe, Sulawesi Tenggara



Dari kronologi singkat di atas menegaskan bahwa eksistensi nelayan telah menyertai babak demi babak peradaban di Nusantara, bahkan jauh sebelum Republik ini berdiri. Dengan beragam dinamika yang terjadi atas kehidupan dan penghidupannya, Nelayan terus eksis dan menjadi perhatian banyak kalangan, meski keberadaannya tidak selalu tercatat rapi dari tahun ke tahun. Dari penelusuran data didapati bahwa jumlah nelayan di Indonesia tercatat pertama kali pada tahun 1978, yakni sebanyak 831.965 orang sebagaimana terungkap dalam Statistik Indonesia 1980/1981 (Biro Pusat Statistik, 1982). Riwayat statistik menunjukkan perkembangan jumlah nelayan secara umum cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan terakhir yang dirilis KKP melalui portaldata. kkp.go.id, jumlah nelayan telah mencapai 3.228.209 orang pada tahun 2024.

Sejauh ini, belum didapati pandangan yang dapat memberikan petunjuk apakah nelayan yang ada saat ini secara jumlah belum atau sudah melampaui kondisi ideal menurut bentang dan potensi wilayah perairan nasional? Terkadang hal tersebut menjadi penting, seperti untuk menyikapi opini yang berkenaan dengan krisis regenerasi nelayan telah beredar, dan juga terkait isu bonus demografi. Mungkin memang diperlukan verifikasi dan validasi atas jumlah dan sebaran nelayan, sekurangnya untuk kepentingan dalam menegaskan realitas atas eksistensi nelayan Nusantara.



© Bartosz Luczak/iStock

Kedudukan dan Peran Penting Nelayan dalam Pembangunan

PENJAGA KEDAULATAN NEGARA

Aktivitas nelayan di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan wilayah yuridiksi adalah bentuk peran menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI.

PENDAYAGUNAAN RUANG LAUT

Nelayan adalah pelaku sekaligus pemangku utama pendayagunaan ruang laut nasional yang mencakup 6,4 juta km^2 atau 77,1% dari luas wilayah kedaulatan negara.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Perempuan nelayan memiliki peran penting dalam usaha perikanan, baik tangkap maupun budidaya, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial-ekonomi lainnya.

PELESTARIAN LINGKUNGAN

Nelayan dengan kearifan lokalnya terlibat dan berdedikasi dalam menjaga ekosistem dan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil agar tetap seimbang dan berkelanjutan.



Sumber: ADPPT, Kemenko Pangan, 2025
(Foto nelayan: Andhika Prasetia/detikcom, DOK. PT Permodalan Nasional Madani)

IKON NEGARA NUSANTARA

Nelayan adalah figur utama representasi negara kepulauan yang menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia.

PENYEDIAAN PANGAN

Nelayan adalah penyedia sumber protein hewani utama bagi masyarakat Indonesia, berkontribusi sekitar 50% dari total konsumsi protein hewani secara nasional.



PENGGERAK EKONOMI

Nelayan adalah pelaku ekonomi lokal di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, menggerakkan roda ekonomi kelautan.

PELESTARIAN BUDAYA MARITIM

Nelayan adalah penjaga dan pelestari nilai-nilai, tradisi, dan khasanah kemaritiman, pengetahuan mereka atas laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah aset berharga bagi negara.

1.2. Definisi Nelayan

Memahami definisi nelayan merupakan landasan pentingsebelum menguraikan profil dan kondisi kehidupan mereka. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia[3] telah memberikan sejumlah definisi mengenai nelayan, termasuk nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh. Definisi tersebut dibentuk untuk kepentingan pengaturan, perlindungan, pemberdayaan, serta pemberian hak dan akses tertentu kepada kelompok yang dikategorikan sebagai nelayan. Perkembangan pengaturan tersebut juga menunjukkan adanya perubahan dalam cara negara mendefinisikan dan mengidentifikasi nelayan, termasuk melalui perubahan ukuran dan kriteria yang digunakan untuk membedakan kelompok nelayan.

1.2.1. Definisi Normatif

Nelayan merupakan bagian penting dari masyarakat pesisir yang kehidupannya berkaitan erat dengan kegiatan penangkapan ikan. Meskipun istilah "nelayan" sering digunakan untuk menyebut orang yang menangkap ikan, dalam praktiknya nelayan memiliki kondisi dan karakteristik yang beragam. Perbedaan tersebut antara lain terlihat dari skala usaha, cara

[3] Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

melakukan penangkapan ikan, kepemilikan sarana produksi, hubungan kerja, hingga pola mata pencaharian.

Nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kehidupannya memiliki hubungan erat dengan kegiatan penangkapan ikan dan sumber daya perairan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengertian nelayan pada dasarnya memiliki unsur yang serupa, meskipun dirumuskan dengan pendekatan yang berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan siapa yang termasuk sebagai nelayan.



Foto: DOK. KNTI

Perbedaan rumusan tersebut dapat dilihat dalam beberapa instrumen hukum internasional hingga nasional sebagai berikut:

Tabel 1. Persebaran Definisi Nelayan Menurut Hukum Internasional dan Nasional

Instrumen Hukum	Definisi
International Labour Organization Convention 188 – Convention Concerning Work in the Fishing Sector sebagaimana diratifikasi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengesahan Convention Concerning Work in the Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188 (Konvensi mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 188)	*Fisher means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers* **Terjemahan:** Nelayan berarti setiap orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam kapasitas apa pun, atau menjalankan suatu pekerjaan di atas kapal penangkap ikan, termasuk di atas kapal dan dibayar berdasarkan bagian dari hasil tangkapan, tetapi tidak termasuk pandu kapal, personel angkatan laut, orang

	lain yang bekerja secara tetap untuk pemerintah, orang yang melaksanakan pekerjaan di atas kapal penangkap ikan, dan pengamat perikanan. **Article 1(e) ILO Convention 188**
International Labour Organization Convention 114 - Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959	*The fisherman shall sign the agreement under conditions which shall be prescribed by national law in order to ensure adequate supervision by the competent public authority.* **Terjemahan:** Nelayan wajib menandatangani perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional untuk memastikan adanya pengawasan yang memadai oleh otoritas publik yang berwenang. **Article 3(2) ILO Convention 114**

Instrumen Hukum	Definisi
UU Perlindungan Nelayan[4] *juncto* UU Perikanan[5] sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja	"Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan."
UU Pangan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja	"Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan."[6]
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman	"Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan."[7]

[4] Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, UU No. 7 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 68, TLN No. 5870, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856, Pasal 1 angka 3.

[5] Undang-Undang tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 118, TLN No. 4433, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, LN Tahun 2009 No. 154, TLN No. 5073, dan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856, Pasal 1 angka 10.

[6] Undang-Undang tentang Pangan, UU No. 18 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 227, TLN No. 5360, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856, Pasal 1 angka 21.

[7] Pergub Jateng tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025, Pasal 1 angka 10.

Merujuk pada definisi di atas, terdapat beberapa unsur yang dapat digunakan untuk memahami pengertian nelayan, yaitu:

a. **Subjek,** yaitu orang yang melakukan atau terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan;
b. **Kegiatan,** yaitu aktivitas penangkapan ikan; dan
c. **Mata pencaharian atau pekerjaan,** yaitu hubungan antara kegiatan penangkapan ikan dengan pekerjaan atau sumber penghidupan seseorang.

Meskipun dirumuskan dengan pendekatan yang berbeda, definisi-definisi tersebut memperlihatkan unsur yang relatif sama. Nelayan merupakan orang yang melakukan atau terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pekerjaan atau sumber penghidupannya. Dalam hukum internasional, khususnya ILO Convention No. 188, penekanan diberikan pada keterlibatan seseorang dalam pekerjaan di atas kapal penangkap ikan. Sementara itu, hukum nasional lebih menekankan hubungan antara kegiatan penangkapan ikan dengan mata pencaharian seseorang. Dengan demikian, pengertian nelayan tidak semata-mata ditentukan oleh aktivitas menangkap ikan, tetapi juga oleh hubungan aktivitas tersebut dengan pekerjaan dan kehidupan ekonomi seseorang.

1.2.2. Definisi Literatur

Literatur memandang definisi nelayan secara lebih luas daripada sekadar orang yang melakukan penangkapan ikan. Dalam pengertian yang paling sederhana, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (di laut).[8] Kemudian, dalam kajian literatur perikanan, Bernos mendefinisikan nelayan sebagai orang yang menangkap atau mengambil sumber daya laut dengan berbagai cara, baik untuk dijual (komersil) maupun untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).[9] Tak hanya itu, Arif Satria kemudian mendefinisikan nelayan sebagai orang yang melakukan penangkapan ikan di laut.[10] Ditjen Perikanan juga memberikan definisi nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan (binatang air atau tanaman air).[11]

Nelayan secara faktual tidak selalu berarti seseorang telah dikenali sebagai nelayan secara administratif. Kajian IOJI menemukan kondisi tersebut di Negeri Akoon (Maluku Tengah).[12]

[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tersedia pada: https://kbbi.co.id/cari?kata=nelayan.

[9] Thaïs A. Bernos et al., "What Can Be Learned from Fishers' Perceptions for Fishery Management Planning? Case Study Insights from Sainte-Marie, Madagascar," PLOS ONE, Vol. 16, No. 11 (2021), hlm. 5.

[10] Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 26, mengutip Direktorat Jenderal Perikanan, Buku Statistik Perikanan Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan, 2000).

[11] *Ibid*., hlm. 27.

[12] Laporan akhir Penelitian Lapangan Negeri Akoon, Maluku Tengah, 3-26 Januari 2022, halaman 12 sebagaimana dikutip dari Indonesia Ocean Justice Initiative, Nelayan dan Keadilan Laut: Kajian Pelaksanaan UU Pemberdayaan Nelayan dan UU Pengelolaan Pesisir di Tujuh Lokasi, (Jakarta: IOJI, 2022), hlm. 47.

Masyarakat setempat melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kegiatan tersebut belum teridentifikasi secara administratif sebagai kegiatan nelayan.[13] Akibatnya, masyarakat menghadapi hambatan dalam mengakses program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur.[14]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengertian nelayan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar aktivitas menangkap ikan. Nelayan dapat dipahami melalui hubungan antara kegiatan penangkapan ikan, mata pencaharian, kondisi sosial-ekonomi, dan pengakuan dalam kebijakan. Pemahaman yang lebih luas ini kemudian penting untuk melihat keragaman kondisi nelayan dan berbagai kategori nelayan yang berkembang dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur.

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.*

1.3. Keragaman dan Kategori Nelayan

Nelayan memiliki kondisi dan karakteristik yang beragam. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan, skala kegiatan, kepemilikan sarana produksi, hubungan kerja, maupun pola mata pencaharian. Dalam praktiknya, perbedaan tersebut membuat orang yang sama-sama bekerja sebagai nelayan dapat memiliki posisi dan kondisi yang berbeda.

Keragaman tersebut kemudian tercermin dalam berbagai kategori nelayan yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan dan literatur. Kategori tersebut digunakan untuk menggambarkan karakteristik tertentu yang melekat pada nelayan, bukan untuk menunjukkan bahwa setiap kategori merupakan profesi yang berbeda. Seorang nelayan dapat memiliki lebih dari satu karakteristik, seperti nelayan kecil yang juga merupakan nelayan tradisional atau nelayan perempuan yang bekerja secara paruh waktu.

Direktorat Jenderal Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ("Ditjen Perikanan KKP") melakukan klasifikasi terhadap nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan, antara lain sebagai berikut:[15]

1. **Nelayan/petani ikan penuh,** yaitu nelayan/petani ikan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
2. **Nelayan/petani ikan sambilan utama,** yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Selain melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan, nelayan kategori ini bisa jadi mempunyai pekerjaan lain.
3. **Nelayan/petani ikan sambilan tambahan,** yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

[15] *Ibid., hlm. 27–28.*

Selain itu, dalam literatur lain, Pollnac membuat kategori nelayan ke dalam dua kelompok, yaitu nelayan besar *(large scale fisher)* dan nelayan kecil *(small-scale fishers)*.[16] Arif Satria dalam "Sosiologi Masyarakat Pesisir" juga membagi nelayan menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:[17]

1. **Nelayan tradisional *(Peasant fisher)*** yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Julukan ini muncul karena alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan untuk diinvestasikan kembali guna pengembangan skala usaha.[16] Umumnya masih menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan tidak bermotor dan masih menggunakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. Adapun ciri dari *peasant fisher* juga pernah digambarkan oleh Firth sebagai nelayan yang menjadi bagian dari ekonomi petani, dengan karakteristik berupa penggunaan teknologi sederhana dan nonmekanis, unit produksi berskala kecil, serta pola produksi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu, pembagian hasil produksi dapat berlangsung secara informal dalam lingkup keluarga atau mengikuti aturan adat tertentu yang kompleks.[17]

[16] Ibid., hlm. 29

[17] Richard B. Pollnac, "Karakteristik Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Perikanan Berskala Kecil' dalam Michael Cernea, Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi dalam Pembangunan Perdesaan (Jakarta: UI Press. 1988) sebagaimana dikutip dalam Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat..., hlm. 29.

[18] Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat..., hlm. 29.

[19] Raymond Flirth, Malay Fishermen: Their Peasant Economy (London: Routledge & Kagan Paul Ltd., 1996) sebagaimana dikutip dalam Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat..., hlm. 30.

2. **Nelayan *post-peasant*** yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan lebih jauh sehingga mereka memperoleh surplus dari hasil tangkapan itu. Nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah pesisir. Nelayan tipe ini sudah mulai berorientasi pasar.
3. ***Commercial fisher,*** yaitu nelayan yang sudah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah membesar yang dicirikan dengan besarnya jumlah tenaga kerja dan status yang berbeda: dari buruh hingga manajemen. Teknologi yang digunakan pun sudah lebih modern, membutuhkan keahlian tersendiri, baik dalam mengoperasikan kapal maupun alat tangkap, misalnya nelayan *purse seine* di Pekalongan,
4. ***Industrial fisher*** yang definisinya, yakni: (a) diorganisasi dengan cara cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara negara maju; (b) secara relatif lebih padat modal; (c) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu dan (d) menghasilkan ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.[18]

[20] Pollnac, "Karakteristik Sosial dan Budaya...," sebagaimana dikutip dalam Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat..., hlm. 30–31.

Selain daripada itu, Charles melakukan klasifikasi nelayan berdasarkan unsur ekologi, pola *human systems*, dan aktivitas perikanan menjadi empat kategori, antara lain sebagai berikut:[21]

1. ***Subsistence fishers,*** yaitu nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
2. ***Native/indigenous/aboriginal fishers,*** yaitu kelompok nelayan yang mempunyai pola kativitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsisten;
3. ***Recreational fishers,*** yaitu nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja;
4. ***Commercial fishers,*** yaitu nelayan yang menangkap komoditas perikanan dalam memenuhi pasar domestik maupun ekspor, yang tergolong menjadi dua kategori, yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.

[21] Anthony Charles, Sustainable Fisheries (Oxford: Blackwell, 1991) sebagaimana dikutip dalam Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat..., hlm. 32.

Berdasarkan regulasi yang berkaitan dengan nelayan dan perikanan di Indonesia, nelayan dapat dikategorikan menjadi beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut:

1. Nelayan Kecil

Perikanan skala kecil *(Small-scale Fisheries*/SSF) dapat dipahami berdasarkan karakteristik produksi, perdagangan, dan interaksi sosialnya.[22] Definisi Nelayan Kecil di Indonesia dapat ditelusuri dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ("UU Perikanan") memberikan definisi perihal nelayan kecil sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[23] Selanjutnya, definisi tersebut mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mendefinisikan Nelayan Kecil sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* (GT).[24] Perubahan tersebut memperjelas definisi Nelayan Kecil sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT.

[22] Hery Saksono, Zulfa Nur Auliatun Nissa', dan Suadi Suadi, "Small-Scale Fisher's Livelihood Strategies: Findings from Case Studies in Several Indonesian Coastal Areas," Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada, Vol. 25, No. 1 (2023), hlm. 9.

[23] Undang-Undang tentang Perikanan, UU Nomor 31 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 118, TLN No. 4433, Pasal 1 angka 11.

[24] Undang-Undang tentang Perikanan, UU Nomor 31 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 118, TLN No. 4433, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 154, TLN No. 5073, Pasal 1 angka 11.

Kemudian, definisi Nelayan Kecil di Indonesia mengalami beberapa perubahan di pelbagai regulasi, terutama semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Perubahan definisi Nelayan Kecil di regulasi Indonesia, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Pelbagai Definisi Nelayan Kecil di Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Peraturan	Definisi
UU Perlindungan Nelayan *juncto* UU Perikanan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.[25]
PP Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* (GT).[26]

[25] UU Perlindungan Nelayan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, Pasal 1 angka 4.

[26] Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, PP Nomor 50 Tahun 2015, LN. 2015 No. 166, TLN No. 5719, Pasal 1 angka 2.

Peraturan	Definisi
PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross tonnage* (GT).[27]
PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.[28]

[27] Peraturan Pemerintah tentang tentang Rencana Tata Ruang Laut, PP Nomor 32 Tahun 2019, LN 2019 No. 89, Pasal 1 angka 32.

[28] Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur, PP Nomor 11 Tahun 2023, LN.2023 No. 36, TLN No. 6853, Pasal 1 angka 8.

Peraturan	Definisi
Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman *juncto* Pergub Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman	Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.[29]
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* (GT) dan menggunakan alat Penangkapan Ikan sederhana atau bekerja pada pemilik kapal.[30]

[29] Definisi Nelayan Kecil sebagaimana termuat dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 juga diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

[30] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016, LD 2016/3, Pasal 1 angka 8.

Sebelum berlakunya UUCK, definisi Nelayan Kecil dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan membatasi kategori tersebut pada orang yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 *gross tonnage* (GT). Batasan tersebut memberikan kriteria yang relatif terukur berdasarkan ukuran kapal, tetapi sekaligus mengecualikan nelayan yang memenuhi kebutuhan hidupnya melalui penangkapan ikan tanpa menggunakan kapal atau menggunakan kapal yang melebihi batas tersebut.

Setelah berlakunya UUCK, definisi nelayan kecil diperluas dengan menghilangkan persyaratan ukuran kapal dan mengakui nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan menggunakan kapal penangkap ikan maupun tanpa kapal. Perubahan ini menunjukkan pergeseran pendekatan regulasi dari klasifikasi yang bertumpu pada ukuran kapal menuju pengakuan berdasarkan mata pencaharian dan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara normatif, perluasan tersebut berpotensi mencakup kelompok nelayan yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria ukuran kapal, sehingga memperluas cakupan subjek yang dapat memperoleh perlindungan dan pemberdayaan.

[30] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016, LD 2016/3, Pasal 1 angka 8.

Namun, perubahan definisi itu tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh nelayan kecil memperoleh manfaat secara efektif, karena realisasinya tetap bergantung pada pelaksanaan ketentuan terkait, identifikasi penerima manfaat, serta akses terhadap program perlindungan dan pemberdayaan.

Selain definisi dari regulasi, terdapat beberapa definisi Nelayan Kecil *(small-scale fisher)* yang dikemukakan oleh ahli. Allison dan Ellis (2001) mendefinisikan nelayan skala kecil sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dari pantai atau menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kecil di perairan pesisir atau perairan darat.[31] Kemudian, Halim *et al.*, menjelaskan bahwa nelayan skala kecil merujuk pada nelayan yang bergantung pada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap non-mekanis dan kapal dengan kapasitas tidak lebih dari 5 *gross tonnage* (GT).[32]

Nelayan skala kecil menggunakan peralatan sederhana dan melakukan kegiatan dalam skala terbatas.[33] Nelayan tersebut umumnya menggunakan pancing ulur, jaring insang, perangkap, serta berbagai alat tangkap tradisional lainnya.[34] Selain daripada itu, nelayan skala kecil biasanya

[31] Edward H. Allison and Frank Ellis, "The Livelihoods Approach and Management of Small-Scale Fisheries," Marine Policy, Vol. 25, No. 5 (2001), hlm. 377.

[32] Abdul Halim et al., "Developing a Functional Definition of Small-Scale Fisheries in Support of Marine Capture Fisheries Management in Indonesia," Marine Policy 100 (2019), hlm. 246.

[33] Hendra Sudirman, Yulia Sari, dan Aldila Mawanti Athira, "Livelihood Status and Income Determinants of Small-Scale Fishers: Evidence from Three Districts in Raja Ampat," Agro Ekonomi, Vol. 37, No. 1 (2026), hlm. 91.

[34] Saksono, Nissa', dan Suadi, "Small-Scale Fisher's...,," hlm. 11.

hanya memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh, porter, atau pelaku usaha kecil.[35]

Nelayan skala kecil yang memiliki karakteristik menyerupai populasi nelayan dan berpindah-pindah mengikuti peluang penangkapan ikan juga melakukan migrasi secara spasial dan temporal mengikuti pergerakan populasi ikan, selain mempertimbangkan berbagai faktor sosial-ekonomi lainnya untuk mempertahankan mata pencaharian mereka.[36] Lebih lanjut, nelayan skala kecil memiliki kegiatan penangkapan yang relatif terbatas, umumnya berada di wilayah dekat pantai, dan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.[37]

Nelayan skala kecil umumnya tinggal di desa-desa pesisir yang aksesnya menuju pusat kota sebagai pusat kegiatan ekonomi relatif sulit dan jauh. Migrasi yang dilakukan nelayan skala kecil dalam konteks ini lebih berupa perpindahan lokasi penangkapan ikan. Migrasi dan perpindahan lokasi tersebut sering menjadi salah satu cara nelayan mempertahankan mata pencahariannya.[38]

[35] *Ibid.*, hlm. 13.

[36] J.C. Njock dan L. Westlund, "Migration, Resource Management and Global Change: Experiences from Fishing Communities in West and Central Africa," Marine Policy, Vol. 34, No. 4 (2010), hlm. 752. Lihat juga Natasha Stacey et al., "Impacts of Marine Protected Areas on Livelihoods and Food Security of the Bajau as an Indigenous Migratory People in Maritime Southeast Asia," dalam Marine Protected Areas: Interactions with Fishery Livelihoods and Food Security (2017), hlm. 116.

[37] Saksono, Nissa', dan Suadi, "Small-Scale Fisher's...," hlm. 9.

[38] A.P. Pauwelussen, "The Moves of a Bajau Middlewoman: Understanding the Disparity between Trade Networks and Marine Conservation," Anthropological Forum, Vol. 25, No. 4 (2015), hlm. 329–330.[34] Saksono, Nissa', dan Suadi, "Small-Scale Fisher's...," hlm. 11.

Permasalahan utama yang dihadapi nelayan skala kecil meliputi masa transisi, meningkatnya biaya, ketidakpastian hasil tangkapan, kondisi cuaca dan kebijakan, keterbatasan kepemilikan modal, keterbatasan akses, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan di luar kegiatan penangkapan ikan.[39] Selain itu, kondisi nelayan kecil secara umum dikenal sebagai nelayan subsisten atau nelayan yang memiliki orientasi komersial terbatas, dengan mata pencaharian yang penuh ketidakpastian dan keterbatasan. Karena mata pencaharian nelayan kecil bergantung pada alam dan sumber daya alam, kehidupan mereka juga bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Ketidakpastian tersebut dapat berasal dari faktor alam maupun faktor lainnya, seperti keterbatasan kemampuan.[40]

2. Nelayan Tradisional

Secara umum, peraturan perundang-undangan memberikan pengertian yang serupa sama mengenai nelayan tradisional. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, PP No. 32 Tahun 2019, dan Pergub Jawa Tengah No. 12 Tahun 2025 sama-sama mendefinisikan nelayan tradisional sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan

[39] Suadi et al., "Livelihood Strategies of Two Small-Scale Fisher Communities: Adaptation Strategies under Different Fishery Resource at Southern and Northern Coast of Java," IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 919, No. 1 (2021), hlm 2–3.

[40] Frédéric Berkes, "Understanding Uncertainty and Reducing Vulnerability: Lessons from Resilience Thinking," Natural Hazards, Vol. 41, No. 2 (2007), hlm. 283–295.

hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Sementara itu, UUPWP3K memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai karakteristik nelayan tradisional. Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2), nelayan tradisional digambarkan sebagai nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, melakukan kegiatan secara turun-temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[41]

Dengan demikian, unsur utama nelayan tradisional terletak pada hubungan yang telah berlangsung secara turun-temurun dengan wilayah penangkapan ikan, budaya, dan kearifan lokal. UUPWP3K kemudian memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik nelayan tradisional melalui penggunaan kapal tanpa mesin, wilayah penangkapan yang tetap, dan orientasi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

[41] Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 1 Tahun 2014, LN 2014 No. 2, TLN No. 5490, Penjelasan Pasal 17 ayat (2).

3. Nelayan Buruh

Pengertian nelayan buruh dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki rumusan yang sama. UU Perlindungan Nelayan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja mendefinisikan nelayan buruh sebagai nelayan yang menyediakan tenaganya dan turut serta dalam usaha penangkapan ikan.[42]

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan memberikan rumusan yang sedikit lebih spesifik dengan menambahkan unsur imbalan. Peraturan tersebut mendefinisikan nelayan buruh sebagai nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam penangkapan ikan dengan memperoleh imbalan.[43] Dengan demikian, ciri utama nelayan buruh terletak pada kedudukannya sebagai pihak yang menyediakan tenaga dalam kegiatan penangkapan ikan.

[42] Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, UU No. 7 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 68, TLN No. 5870, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856, Pasal 1 angka 7.

[43] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016, LD 2016/3, Pasal 1 angka 9.

4. Nelayan Pemilik

Peraturan perundang-undangan mengaitkan status nelayan pemilik dengan kepemilikan atau penguasaan atas kapal yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan. UU Perlindungan Nelayan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja mendefinisikan nelayan pemilik sebagai nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.[44]

Sementara itu, Perda Jawa Barat No. 3 Tahun 2016 menggunakan rumusan yang lebih luas. Peraturan tersebut menyebut nelayan pemilik sebagai nelayan yang berkuasa atas kapal atau perahu yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan, baik sebagai perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha.

Dengan demikian, nelayan pemilik merupakan nelayan yang memiliki atau menguasai kapal atau perahu sebagai sarana produksi dalam kegiatan penangkapan ikan. Perbedaan kedua pengaturan tersebut terutama terletak pada penekanannya, yakni UU Perlindungan Nelayan menegaskan unsur kepemilikan dan keterlibatan aktif dalam penangkapan ikan, sedangkan Perda Jawa Barat juga mengakomodasi penguasaan kapal, termasuk oleh badan usaha.

[44] Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, UU No. 7 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 68, TLN No. 5870, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856, Pasal 1 angka 12.

5. Nelayan Penggarap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan mendefinisikan nelayan penggarap sebagai semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.[45]

6. Nelayan Paruh Waktu

Tidak semua nelayan menggantungkan seluruh waktu dan penghasilannya dari kegiatan penangkapan ikan. Sebagai contoh, di Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman ("Pergub Jawa Tengah No. 12 Tahun 2025") mendefinisikan nelayan paruh waktu sebagai nelayan yang menjadikan kegiatan nelayan sebagai profesi utama, tetapi memiliki pekerjaan lain untuk memperoleh tambahan penghasilan.[46] Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan ikan tetap menjadi pekerjaan utama, sementara pekerjaan lain dilakukan untuk melengkapi penghasilan.

[45] Undang-Undang tentang tentang Bagi Hasil Perikanan, UU Nomor 16 Tahun 1964, LN. 1964/No. 97, TLN No. 2690, Pasal 1 huruf c.

[46] Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025, BD.2025/No.12, Pasal 1 angka 15.

Pembagian berdasarkan waktu dan sumber penghasilan juga dikenal dalam *Coordinating Working Party on Fishery Statistics* (CWP). CWP membedakan nelayan menjadi *full-time fishers, part-time fishers,* dan *occasional fishers* berdasarkan proporsi waktu kerja atau mata pencaharian yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan.[47] Nelayan *full-time* mencurahkan sekurang-kurangnya 90% waktu kerja atau mata pencahariannya pada kegiatan penangkapan ikan. Nelayan *part-time* mencurahkan 30% hingga kurang dari 90%, sedangkan *occasional fishers* mencurahkan kurang dari 30%.

7. Nelayan Lokal

Definisi nelayan lokal diatur pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT. Adapun definisi dari nelayan lokal menurut dua regulasi tersebut adalah nelayan yang berdomisili pada provinsi di Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili atau domisili usaha serta melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

[47] FAO, *"Groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches* (CWP)," FAO, n.d., tersedia pada https://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishers/fr/, diakses pada 5 Oktober 2026.

8. Nelayan Perempuan

Nelayan perempuan *(fisherwomen)* didefinisikan sebagai perempuan yang menjalankan kegiatan penangkapan untuk kebutuhan subsisten, menargetkan jenis ikan dengan nilai ekonomi lebih rendah serta invertebrata, dan mencari sumber daya laut di wilayah pesisir yang mudah dijangkau.[50]

[50] Thaïs A. Bernos et al., "What Can Be Learned from Fishers' Perceptions for Fishery Management Planning? Case Study Insights from Sainte-Marie, Madagascar," PLOS ONE, Vol. 16, No. 11 (2021), hlm. 3.



Foto: DOK. KNTI

CONTOH PENGAYAAN MATERI DARI TIM IOJI

Tangguhnya Nelayan Perempuan di Demak, 30 Tahun Arungi Lautan

Angga Laraspati - detikNews, 15 Mar 2021

Jangan pernah sekali-kali ragukan kekuatan seorang perempuan, sebab banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. Salah satu contohnya ada di Dukuh Tambak Polo, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di tempat ini, banyak perempuan yang bekerja sebagai nelayan dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebut saja salah satunya Siti Bauzah (60) yang sudah 30 tahun mengenyam asam garam kehidupan selama menjadi nelayan.

Di atas sebuah perahu kayu, ibu 4 anak ini bercerita dirinya sudah kurang lebih 30 tahun mengarungi lautan untuk menghidupi keluarganya. Mengikuti suaminya yang terlebih dahulu menjadi nelayan, Bauzah memilih untuk melaut setelah menikah dengan lelaki idamannya agar dapur rumah tangga tetap mengepul.

"Waktu itu saya memilih menjadi nelayan karena kebutuhannya semakin banyak, anak sudah semakin banyak dan kebutuhan mereka akan pendidikan juga semakin tinggi. Dari situlah saya memutuskan untuk menjadi nelayan membantu suami saya," ujar Bauzah.

Ia bercerita, dirinya selalu pergi melaut setiap hari bila cuacanya juga mendukung. Dalam kesehariannya, Bauzah juga tak lupa untuk melakukan kegiatan ibu rumah tangga. Pukul 2 pagi biasanya ia sudah bangun untuk mempersiapkan segala keperluan melaut, kemudian pukul setengah 3 dirinya bersama suami pergi ke laut untuk menangkap ikan.

"Pembagian tugasnya ya paling suami memegang kemudi, kemudian kami perempuannya yang menyebar jaring," ujarnya.

Adapun untuk ikan yang sering ia dapatkan setiap harinya tak menentu, terkadang ia bisa mendapatkan ikan gerabah, kedoan, pari kecil, kepiting, hingga rajungan. Pendapatannya pun juga tak menentu, karena bisa saja di satu hari dirinya tidak mendapatkan ikan sedikitpun.

"Selama melaut penghasilan itu tidak menentu, kalau musim mudah itu bisa mencapai Rp 200-300.000 perhari, kalau musim paceklik kadang Rp 50-70.000 kadang tidak dapat apa-apa," ujarnya.

30 tahun mengarungi lautan bukan berarti dirinya tidak memiliki pengalaman yang mencekam. Namun, salah satu yang paling membekas bagi dirinya adalah ketika ia dan suami hampir tenggelam ketika kapal yang mereka gunakan ditabrak oleh kapal cantrang besar.

"Saya di tengah laut ditabrak kapal cantrang besar, saya dan suami juga ikut tenggelam karena perahunya itu ambles (tenggelam). Alhamdulillah, ABK kapal yang menabrak waktu itu langsung menolong dan diajak pulang ke rumahnya," ungkap Bauzah.

Dari hasil nelayan selama 30 tahun tersebut, bukan berarti Bauzah tidak dapat menghasilkan sesuatu. Ia dan suaminya sukses menyekolahkan 4 anaknya hingga bangku SMA. Bahkan 2 anak dari Bauzah ada yang menjadi hafiz Al-Quran, keduanya pun kini tinggal di daerah Bantul dan Demak.



Foto: Pradita Utama/detikcom

1.4. Karakteristik Kehidupan dan Penghidupan Nelayan

Kehidupan dan penghidupan nelayan tak hanya ditentukan oleh aktivitas penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama, tetapi juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang saling berkaitan. Karakteristik pekerjaan nelayan yang bergantung pada kondisi alam, musim, maupun ketersediaan sumber daya ikan membentuk pola pendapatan serta strategi penghidupan nelayan. Di sisi lain, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan juga turut mempengaruhi cara nelayan dalam menjalankan pekerjaannya.

Kegiatan menangkap ikan berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi nelayan. Dalam banyak masyarakat pesisir, hasil tangkapan menjadi sumber pendapatan utama dan menjadi bagian penting dari kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kondisi nelayan tidak dapat dipahami hanya dari jenis kegiatan penangkapannya, tetapi juga dari seberapa besar kehidupan mereka bergantung pada kegiatan tersebut.

Kajian IOJI mengenai Nelayan dan Keadilan Laut: Kajian Pelaksanaan UU Pemberdayaan Nelayan dan UU Pengelolaan Pesisir Di Tujuh Lokasi (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada perikanan tangkap berada dalam skala perikanan kecil.[51] Keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan menyebabkan pendapatan mereka cenderung terbatas dan

[51] Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Nelayan dan Keadilan Laut: Kajian Pelaksanaan UU Pemberdayaan Nelayan dan UU Pengelolaan Pesisir di Tujuh Lokasi (Jakarta: IOJI, 2022), hlm. 2.

tidak stabil. Kondisi tersebut juga memengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah.

Pekerjaan nelayan memiliki karakteristik yang membedakannya dari pekerjaan di sektor lain. Nelayan menggantungkan kegiatan produksinya pada pemanfaatan sumber daya ikan yang keberadaan, persebaran, dan ketersediaannya dipengaruhi oleh kondisi ekosistem perairan. Nelayan juga menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan karena keberhasilan kegiatan penangkapan tidak sepenuhnya dapat ditentukan melalui perencanaan tenaga kerja, modal, dan teknologi.[52] Kondisi cuaca, musim penangkapan, lokasi penangkapan, serta ketersediaan ikan turut mempengaruhi hasil yang dapat diperoleh dalam setiap perjalanan melaut. Karakteristik tersebut menyebabkan kegiatan penangkapan ikan memiliki hubungan yang erat dengan risiko ekonomi. Nelayan harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar, perbekalan, perawatan kapal, alat tangkap, dan kebutuhan awak kapal sebelum memperoleh hasil penjualan.

Sementara itu, besarnya hasil tangkapan dan nilai jual ikan belum dapat dipastikan sejak awal perjalanan. Ketika hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, nelayan dapat mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kerugian. Oleh karena itu, besarnya hasil tangkapan saja tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi nelayan.

[51] Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1–2.

Di samping ketidakpastian alam dan ekonomi, pekerjaan nelayan juga memiliki dimensi sosial. Kegiatan penangkapan ikan melibatkan pembagian peran di antara pemilik kapal, nakhoda, awak kapal, pedagang, dan pihak lain dalam rantai pemasaran hasil perikanan. Hubungan antarpelaku tersebut dapat menentukan akses nelayan terhadap kapal, modal, perbekalan, alat tangkap, serta saluran pemasaran. Dalam keadaan tertentu, nelayan yang tidak memiliki kapal atau modal sendiri bergantung pada pemilik kapal maupun pemberi pinjaman untuk menjalankan pekerjaannya.

1.4.1. Keragaman Pola Mata Pencaharian dan Kehidupan Nelayan

Masyarakat pesisir tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang homogen dengan pola mata pencaharian yang seragam. Kekhasan karakteristik ekosistem pesisir turut membentuk keragaman karakteristik sosial masyarakat yang tinggal di dalamnya. Masyarakat pesisir tidak hanya terdiri atas nelayan penangkap ikan, tetapi juga mencakup pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang, dan kelompok lain yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat pesisir terbentuk melalui berbagai jenis pekerjaan yang saling berhubungan.

Di dalam kegiatan penangkapan ikan sendiri, nelayan memiliki posisi dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan dapat terlihat antara nelayan pemilik kapal dan nelayan buruh, antara nakhoda dan awak kapal, serta antara

nelayan yang menggunakan skala usaha dan alat tangkap yang berbeda. Nelayan yang memiliki kapal dan modal usaha mempunyai tanggung jawab terhadap pembiayaan operasional, pemeliharaan sarana penangkapan, dan pemasaran hasil tangkapan. Sebaliknya, nelayan buruh umumnya mengandalkan keterlibatan mereka dalam kegiatan melaut untuk memperoleh pendapatan, dengan besaran penghasilan yang dapat dipengaruhi oleh sistem pengupahan atau pembagian hasil yang berlaku. Perbedaan posisi tersebut dapat menghasilkan perbedaan dalam penguasaan aset, tingkat risiko ekonomi, dan kemampuan menghadapi penurunan hasil tangkapan.

Selain perbedaan posisi dalam usaha perikanan, rumah tangga nelayan juga dapat mengembangkan beragam strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian rumah tangga mengandalkan kegiatan penangkapan ikan sebagai sumber pendapatan utama, sedangkan sebagian lainnya menggabungkan kegiatan tersebut dengan pekerjaan tambahan, seperti mengolah dan menjual ikan, berdagang, menjalankan usaha kecil, atau bekerja di sektor lain. Diversifikasi mata pencaharian dapat menjadi strategi untuk menghadapi ketidakpastian pendapatan dari kegiatan penangkapan. Namun, diversifikasi tidak selalu menghasilkan perbaikan kesejahteraan secara otomatis. Hasilnya bergantung pada ketersediaan peluang kerja, keterampilan, modal, akses pasar, serta waktu dan tenaga yang dapat dialokasikan oleh anggota rumah tangga.[54]

[54] Matthew B. Roscher et al., "Sustainable Development Outcomes of Livelihood Diversification in Small-Scale Fisheries," Fish and Fisheries, Vol. 23, No. 4 (2022), hlm. 910–925.

Dalam konteks ini, keragaman pola mata pencaharian perlu dipahami sebagai bagian dari strategi rumah tangga dalam mempertahankan penghidupan, bukan sekadar sebagai perbedaan jenis pekerjaan. Tatkala hasil tangkapan menurun atau musim penangkapan berubah, rumah tangga nelayan dapat menyesuaikan sumber pendapatannya melalui pekerjaan alternatif. Sebaliknya, apabila pilihan pekerjaan di luar sektor perikanan terbatas, rumah tangga dapat tetap bergantung pada penangkapan ikan meskipun kegiatan tersebut menghadapi risiko ekonomi yang tinggi.

1.4.2. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Kehidupan dan Penghidupan Nelayan

Kehidupan dan penghidupan nelayan tidak hanya ditentukan oleh karakteristik pekerjaan dan besarnya pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan. Kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan juga mempengaruhi kemampuan nelayan untuk menjalankan pekerjaannya, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta mempertahankan keberlangsungan penghidupan. Anthony Charles menggunakan pendekatan sistem perikanan untuk menjelaskan bahwa perikanan terbentuk melalui interaksi berbagai komponen ekologis, biofisik, ekonomi, sosial, dan budaya.[55]

[55] Pendekatan ini menempatkan kegiatan penangkapan ikan sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, sehingga perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi komponen lainnya. Lihat Anthony Charles, Sustainable Fishery Systems, ed. ke-2 (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2023), hlm. 6.

Pertama, aspek sosial mempengaruhi kedudukan nelayan dalam komunitas dan akses mereka terhadap sumber daya yang diperlukan untuk bekerja. Hubungan antara pemilik kapal, nakhoda, awak kapal, pedagang, dan pemberi modal dapat menentukan cara nelayan memperoleh pekerjaan, membiayai kegiatan melaut, serta menjual hasil tangkapannya. Jaringan sosial dan kelembagaan lokal juga dapat menjadi sarana untuk memperoleh informasi, bantuan, dan dukungan ketika nelayan menghadapi kesulitan. Sebaliknya, ketimpangan penguasaan kapal, modal, dan akses pasar dapat membatasi pilihan ekonomi nelayan yang tidak memiliki aset produksi.[56]

Kedua, aspek ekonomi berkaitan dengan pendapatan, biaya produksi, penguasaan aset, akses terhadap modal, dan kesempatan untuk memasarkan hasil tangkapan. Pendapatan nelayan tidak hanya bergantung pada jumlah ikan yang berhasil ditangkap, tetapi juga pada nilai jual ikan, biaya operasional, mekanisme pembagian hasil, dan posisi nelayan dalam rantai pemasaran. Nelayan yang menghadapi kenaikan biaya bahan bakar atau penurunan harga ikan, misalnya, dapat mengalami penurunan pendapatan bersih meskipun masih memperoleh hasil tangkapan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan hasil produksi, penerimaan penjualan, dan pendapatan bersih ketika menilai kesejahteraan nelayan. Akses terhadap modal dan pasar juga dapat memengaruhi kemampuan

[56] Tjahjo Tri Hartono dan Zahri Nasution, "Aspek-Aspek Sosial Budaya dalam Kerangka Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Indonesia," Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, Vol. 11, No. 3 (2005), hlm. 21–39.

nelayan untuk mempertahankan usaha, memperbaiki alat tangkap, atau mencari sumber penghasilan alternatif.[57]

Ketiga, aspek budaya berkaitan dengan nilai, pengetahuan lokal, kebiasaan, dan praktik sosial yang berkembang melalui interaksi masyarakat dengan lingkungan laut. Pengalaman melaut dapat membentuk pengetahuan nelayan mengenai musim, cuaca, lokasi penangkapan, perilaku ikan, serta perubahan kondisi perairan. Pengetahuan tersebut dapat membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi penangkapan serta menyesuaikan strategi ketika menghadapi perubahan lingkungan. Selain itu, kebiasaan bekerja secara berkelompok, sistem pembagian hasil, dan hubungan antar generasi dapat memengaruhi cara nelayan mengorganisasikan kegiatan produksi dan mempertahankan kehidupan komunitasnya.[58]

Keempat, aspek lingkungan memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan pekerjaan dan penghidupan nelayan karena sumber daya ikan bergantung pada kondisi ekosistem perairan.[59] Perubahan musim, cuaca ekstrem, kerusakan habitat, pencemaran, dan perubahan ketersediaan ikan dapat mempengaruhi lokasi penangkapan, jumlah hasil tangkapan, durasi melaut, serta biaya yang harus dikeluarkan. Ketika ikan semakin sulit ditemukan di lokasi penangkapan yang biasa digunakan, nelayan dapat terdorong untuk melaut lebih jauh

[57] Hartono dan Nasution, "Aspek-Aspek Sosial Budaya...," hlm. 21–39.

[58] Zahri Nasution dan Tjahjo Tri Hartono, "Profil Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Perairan Laut di Indonesia," Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, Vol. 10, No. 7 (2004), hlm. 47–53.

[59] Charles, Sustainable Fishery Systems..., hlm. 6. Lihat juga Maarten Bavinck, "Charles, A. 2023. Sustainable Fishery Systems (Second Edition)," Maritime Studies 23 (2024), hlm. 19–21.

atau menghabiskan waktu lebih lama di laut. Penyesuaian tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan bakar dan perbekalan sekaligus memperbesar risiko keselamatan dan kerugian ekonomi.

Keempat aspek tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, penurunan ketersediaan ikan dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan pendapatan nelayan. Dampak ekonomi tersebut kemudian dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam rumah tangga, pembagian kerja, serta keputusan untuk mencari pekerjaan alternatif. Pada saat yang sama, akses terhadap modal, jaringan sosial, pengetahuan lokal, dan peluang kerja di luar sektor perikanan dapat menentukan kemampuan setiap rumah tangga untuk menghadapi perubahan tersebut.

Nelayan bukan sekadar pencari ikan. Mereka adalah penjaga laut, penghidup pesisir, penyedia pangan, dan bagian penting dari denyut kehidupan bangsa.



© Creativica/iStock (disunting tambahan dengan AI)

BAB DUA:

2 Wajah Nelayan Indonesia: Siapa Nelayan dalam Survei?



© Yonggi Foto/Instagram

"Nelayan Indonesia bukan kelompok yang seragam. Perbedaan skala usaha, kepemilikan kapal, hubungan kerja, dan kondisi sosial-ekonomi membentuk karakteristik serta kebutuhan yang beragam".

Bagian sebelumnya telah menguraikan siapa yang disebut sebagai nelayan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur, termasuk keragaman kategori dan kondisi yang membentuk kehidupan mereka. Pertanyaan berikutnya adalah: siapa saja nelayan yang tercakup dalam survei ini? Apa karakteristik individu yang menjalani profesi sebagai nelayan, dan sejauh mana profil responden dapat menggambarkan keragaman nelayan sebagaimana diuraikan dalam literatur.

Bab ini menguraikan profil individu yang dianalisis berdasarkan sejumlah karakteristik sosial-demografis yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, alasan menjadi nelayan, dan lama menekuni profesi sebagai nelayan. Karakteristik tersebut tidak hanya menggambarkan komposisi responden, tetapi juga membantu memahami keragaman nelayan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Usia dan lama menekuni profesi, misalnya, memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi profesi nelayan.

Sementara itu, pendidikan, status pernikahan, serta alasan memilih profesi dapat menunjukkan konteks sosial yang membentuk pilihan dan kapasitas penghidupan nelayan. Profil

ini menjadi titik awal untuk mengenali latar belakang individu yang tercakup dalam survei sebelum membahas kondisi kegiatan penangkapan, rumah tangga, kehidupan sosial budaya serta kerentanan dan resiliensi nelayan pada bagian berikutnya.

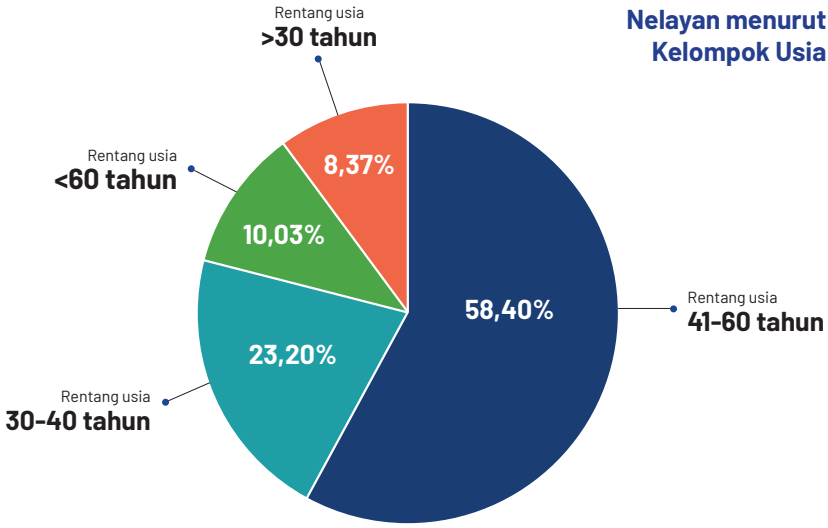
Namun, karakteristik responden yang tersaji dalam survei ini belum tentu mencakup seluruh keragaman nelayan yang telah diidentifikasi dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur. Komposisi responden dan cakupan data yang tersedia membatasi sejauh mana berbagai kategori dan pengalaman nelayan dapat tergambarkan. Perbedaan komposisi responden pada setiap kategori perlu dipertimbangkan ketika membaca temuan, khususnya dalam melihat kelompok yang jumlahnya relatif kecil. Oleh karena itu, profil ini perlu dibaca sebagai gambaran mengenai nelayan yang berpartisipasi dalam survei, bukan sebagai representasi menyeluruh dari keragaman nelayan di Indonesia.

2.1. Usia

Mata pencaharian nelayan dalam survei ini ditekuni oleh penduduk dengan rentang usia yang cukup luas, mulai dari kelompok di bawah 18 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Namun demikian, distribusi responden terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa dan paruh baya. Kelompok usia 41-60 tahun merupakan kelompok terbesar, yaitu 949 responden atau 58,40% dari seluruh responden. Kelompok usia 30-40 tahun mencapai 23,20%, sedangkan responden berusia di atas 60

tahun sebesar 10,03%. Sebaliknya, responden berusia di bawah 30 tahun hanya mencakup 8,37% dari keseluruhan responden, yang terdiri atas 0,37% berusia di bawah 18 tahun, 2,28% berusia 19–24 tahun, dan 5,72% berusia 25-29 tahun.

Nelayan menurut Kelompok Usia





Ilustrasi AI

Dengan demikian, sekitar empat dari setiap lima responden (81,60%) berada pada rentang usia 30-60 tahun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa dalam survei ini, kegiatan penangkapan ikan lebih banyak dijalankan oleh nelayan yang berada pada usia dewasa dan paruh baya dibandingkan oleh kelompok usia muda. Temuan ini juga menunjukkan bahwa nelayan berusia di atas 60 tahun masih memiliki proporsi yang cukup berarti, yaitu sekitar satu dari sepuluh responden. Dengan kata lain, kegiatan penangkapan ikan tidak hanya dijalankan oleh kelompok usia produktif yang lebih muda, tetapi juga oleh nelayan yang telah berada pada tahap usia lanjut.

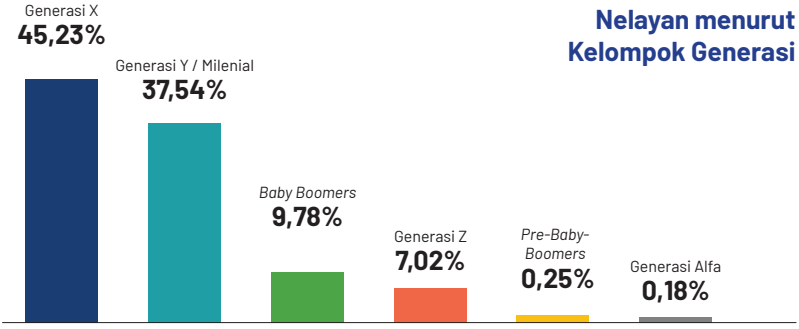
Temuan ini menjadi penting ketika dibaca dalam konteks regenerasi nelayan. Proporsi nelayan berusia 20–29 tahun yang hanya 7,82% menunjukkan bahwa kelompok nelayan muda belum menjadi bagian terbesar dari populasi responden. Namun demikian, angka tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa profesi nelayan sedang mengalami krisis regenerasi. Untuk menyimpulkan hal tersebut diperlukan data mengenai kecenderungan masuk dan keluarnya tenaga kerja dari sektor perikanan, perubahan pilihan pekerjaan antargenerasi, serta minat generasi muda untuk melanjutkan profesi nelayan. Data survei ini lebih tepat menunjukkan bahwa nelayan yang telah berada dalam profesi tersebut pada saat survei didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua.

Hal tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membedakan antara usia nelayan dan keberlanjutan profesi nelayan. Bertambahnya usia nelayan tidak dengan sendirinya

berarti profesi tersebut tidak berkelanjutan. Sebaliknya, keberlanjutan profesi juga bergantung pada apakah pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, isu regenerasi tidak cukup dijawab dengan mendorong lebih banyak anak muda menjadi nelayan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi kerja, keselamatan, pendapatan, akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar, dan posisi sosial profesi nelayan.

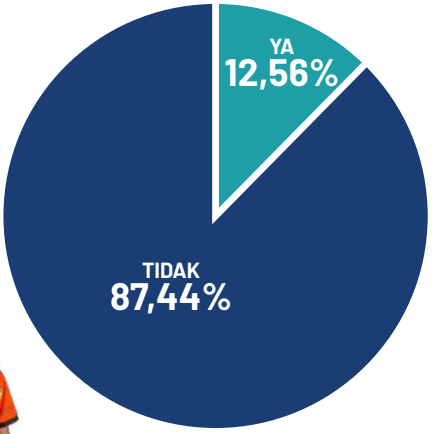
Menurut klasifikasi generasi yang digunakan dalam survei, responden paling banyak berasal dari Generasi X, yaitu 45,23%, diikuti oleh Generasi Y atau Milenial sebesar 37,54%. Selanjutnya, *Baby Boomers* mencakup 9,78%, Generasi Z sebesar 7,02%, *Pre-Baby Boomers* sebesar 0,25%, dan Generasi Alfa sebesar 0,18%. Dengan demikian, hampir seluruh responden (92,55%) berasal dari Generasi X, Generasi Y/Milenial, dan *Baby Boomers*, sementara Generasi Z dan Generasi Alfa secara bersama-sama hanya mencakup 7,20% responden.

Nelayan menurut Kelompok Generasi



Komposisi tersebut dapat dibaca sebagai gambaran bahwa profesi nelayan dalam survei lebih banyak dijalankan oleh mereka yang telah berada dalam usia kerja dan menekuni pekerjaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, rendahnya proporsi Generasi Z dan terutama Generasi Alfa dapat berkaitan dengan semakin kecilnya keterlibatan kelompok usia muda dalam kegiatan penangkapan ikan. Namun, pola ini tidak serta-merta berarti bahwa generasi muda sama sekali tidak memasuki profesi nelayan. Rendahnya proporsi tersebut dapat mencerminkan proses yang lebih kompleks, termasuk pilihan generasi muda terhadap pekerjaan lain, perpindahan dari atau ke sektor perikanan, maupun pola pewarisan pekerjaan dalam keluarga.

Nelayan menurut Harapan terhadap Anak untuk Melanjutkan Profesi sebagai Nelayan





© Aruna Indonesia/Facebook

Komposisi generasi dalam survei dapat menjadi indikasi bahwa keberlanjutan profesi nelayan tidak berlangsung secara otomatis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Profesi tersebut memang masih dijalankan secara luas oleh Generasi X dan Generasi Milenial, tetapi keterlibatan generasi yang lebih muda tampak semakin terbatas.

Pertanyaan yang kemudian penting bukan hanya apakah jumlah nelayan muda lebih sedikit, melainkan mengapa generasi muda memilih untuk masuk, bertahan, atau meninggalkan profesi nelayan. Pertanyaan tersebut penting untuk memahami regenerasi nelayan sebagai persoalan keberlanjutan mata pencaharian.

2.2. Jenis Kelamin

Perempuan merupakan bagian penting dari kehidupan dan penghidupan masyarakat nelayan. Peran tersebut tidak hanya dijalankan oleh perempuan yang secara langsung menangkap ikan, tetapi juga oleh seluruh yang terlibat di sepanjang rantai usaha perikanan, mulai dari tahap persiapan melaut hingga pemasaran. Namun, kontribusi tersebut kerap kurang terlihat karena kerja perempuan masih sering dipahami sebagai bentuk bantuan terhadap nelayan laki-laki, alih-alih sebagai kerja perikanan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tersendiri. Kondisi ini berpengaruh pada pengakuan perempuan sebagai pelaku usaha perikanan sekaligus pada akses mereka terhadap fasilitas, sarana-prasarana, subsidi, kegiatan pemberdayaan, dan bantuan yang semestinya dapat diakses oleh nelayan skala kecil.[60]

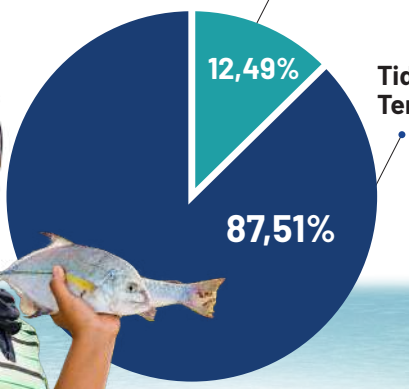
Hasil survei mencatat terdapat 17 responden nelayan perempuan atau 1,05% dari keseluruhan responden, sementara 1.608 responden lainnya adalah nelayan laki-laki atau 98,95%. Komposisi ini perlu dibaca secara hati-hati dan tidak dapat serta-merta dipahami sebagai gambaran proporsi nelayan perempuan secara nasional. Rendahnya jumlah responden perempuan tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai rendahnya keterlibatan perempuan dalam sektor perikanan. Sebaliknya, angka tersebut dapat menunjukkan bahwa definisi responden dan cara pendataan kegiatan perikanan lebih mudah

[60] Lucentezza Napitupulu and Smita Tanaya (WRI), "3 Reasons Why Women In Fisheries Matter For An Inclusive Economic Recovery," https://wri-indonesia.org/en/insights/3-reasons-why-women-fisheries-matter-inclusive-economic-recovery, diakses pada 2 Oktober 2026.

menangkap individu yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dibandingkan mereka yang bekerja pada tahapan lain dalam rantai nilai.

Keterlibatan tersebut juga tercermin dalam temuan bahwa 12,49% nelayan menyatakan istrinya terlibat dalam aktivitas usaha perikanan. Bentuk keterlibatan yang paling banyak disebut adalah menjual hasil tangkapan sebesar 49,53%, membantu persiapan melaut sebesar 24,53%, dan mengolah hasil tangkapan sebesar 20,75%. Selain itu, 5,19% nelayan menyatakan bahwa keterlibatan istri juga dilakukan melalui aktivitas melaut atau menangkap ikan. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya berada di belakang kegiatan perikanan, tetapi turut menjalankan fungsi-fungsi penting yang memungkinkan hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi dan sampai kepada pasar.

Nelayan menurut Keterlibatan Istri dalam Usaha Melaut

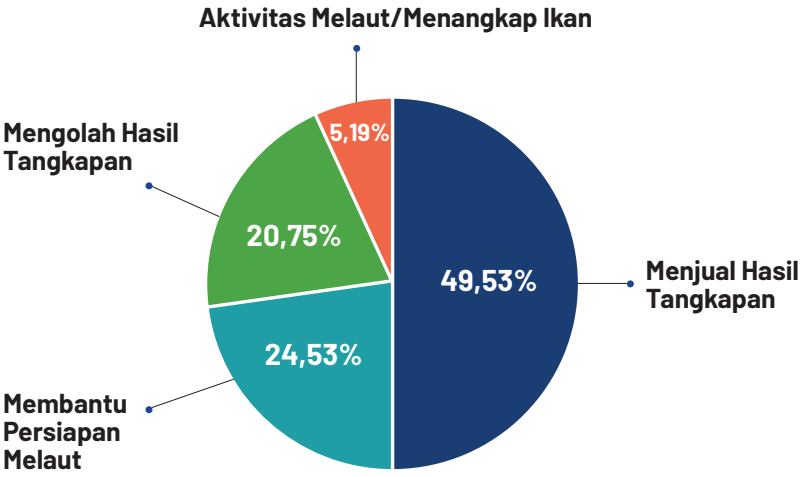






© Nuture/iStock
© Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia

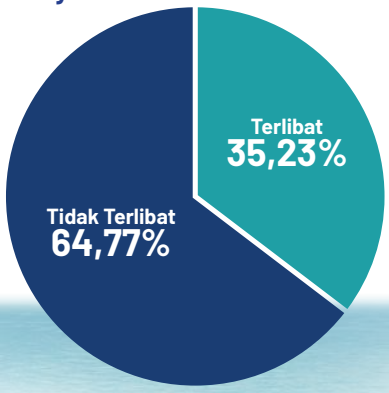
Keterlibatan Istri Nelayan menurut Bentuk Aktivitas yang Dilakukan




© EoNaYa/iStock

Peran perempuan juga menopang strategi penghidupan rumah tangga nelayan di luar kegiatan penangkapan ikan. Sebanyak 35,23% nelayan yang menjalankan usaha lain di luar penangkapan ikan turut melibatkan istri dalam usaha tersebut. Keterlibatan tersebut terutama terlihat dalam kegiatan pertanian dan perdagangan, termasuk pengelolaan warung, pelayanan kepada pembeli, hingga memasak pada warung makan. Meski demikian, 64,77% nelayan yang memiliki usaha lain tidak melibatkan istri, terutama pada pekerjaan seperti buruh bangunan, jasa transportasi, jasa reparasi, pembuatan alat tangkap, serta pembuatan perahu atau kapal. Dalam konteks rumah tangga nelayan, peran ekonomi perempuan menjadi semakin penting karena nelayan tidak hanya menanggung istri dan anak, tetapi 22,83% responden juga memiliki tanggungan anggota keluarga lain, seperti orang tua atau mertua, adik, kakak, dan kerabat lainnya.

Nelayan dengan Usaha/Pekerjaan Lainnya di Luar Penangkapan Ikan menurut Keterlibatan Istri





© Ady Candra

Kerja perempuan di sektor perikanan memiliki implikasi langsung terhadap keamanan keluarga nelayan. Ketika hasil tangkapan menurun, cuaca buruk membatasi aktivitas melaut, atau biaya hidup meningkat, perempuan kerap menjadi pihak yang memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi melalui pengolahan hasil perikanan, pemasaran, usaha sampingan, maupun kerja perawatan di dalam keluarga. Kerentanan tersebut dapat meningkat dalam situasi krisis iklim karena perempuan sering menghadapi posisi sosial-ekonomi yang belum setara, keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, beban domestik yang lebih besar, serta norma sosial yang dapat membatasi kapasitas adaptasi mereka. Dengan demikian, perubahan iklim di wilayah pesisir bukan hanya persoalan lingkungan hidup, melainkan juga persoalan keadilan gender.[61]

Dari aspek hukum, kerangka hukum perikanan di Indonesia cenderung dirumuskan secara netral gender, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam praktiknya, pendekatan yang tampak netral tersebut belum tentu menjamin akses yang setara bagi perempuan yang bekerja sebagai nelayan maupun pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu, pengakuan yang lebih tegas terhadap perempuan dalam sektor perikanan diperlukan agar perlindungan, pemberdayaan, dan manfaat kebijakan benar-benar dapat dijangkau secara setara.

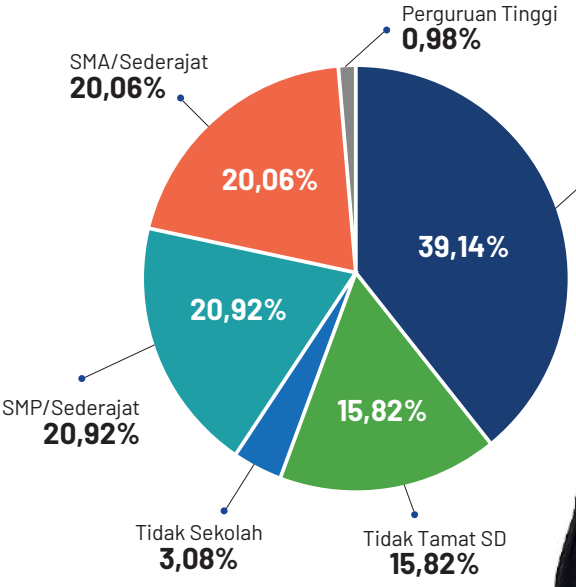
[61] World Bank Group, Gender Thematic Policy: Placing Gender Equality at the Center of Climate Action (2023).

Salah satu langkah yang menunjukkan arah pengakuan tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pembudidaya Garam Yang disahkan pada 14 Maret 2025. Peraturan ini memperluas perlindungan dan asuransi bagi nelayan, mengakui serta memberikan perlindungan terhadap perempuan di sektor perikanan, mengatur partisipasi publik, dan menyediakan bantuan hukum bagi nelayan kecil. Kehadiran kebijakan seperti ini penting untuk memperlihatkan bahwa perempuan perlu diposisikan bukan hanya sebagai anggota keluarga nelayan, melainkan sebagai pelaku usaha perikanan dan pemegang hak yang berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, pangan, dan kehidupan masyarakat pesisir.

2.3. Pendidikan

Tingkat pendidikan formal nelayan yang berdasarkan survei, 58,03% hanya menamatkan pendidikan setingkat SD dan/atau lebih rendah. Perinciannya terdiri dari 39,14% tamat SD/sederajat, 15,82% tidak tamat SD, dan 3,08% tidak sekolah. Nelayan yang menamatkan pendidikan SMP/sederajat sebanyak 20,92%. Komposisi tersebut kurang lebih setara dengan yang menamatkan SMA/sederajat, yakni 20,06%. Sementara itu, nelayan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi tercatat hanya sebanyak 0,98%.

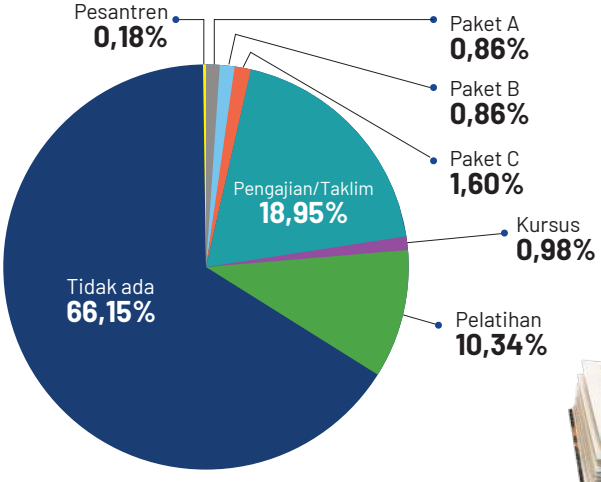
Nelayan menurut Tingkat Pendidikan Formal yang Ditamatkan





Selain pendidikan formal, beberapa nelayan juga pernah mengemban pendidikan non formal. Sebanyak 66,15% belum terakses pendidikan non formal, sehingga hanya 33,85% pernah terlibat dalam pendidikan non formal, dimana pengajian/majelis taklim (18,95%) dan pelatihan terkait kegiatan penangkapan ikan (10,34%) adalah jenis yang paling banyak diikuti. Dengan demikian, akses terhadap pendidikan nelayan tidak hanya menjadi persoalan pendidikan formal, tetapi juga persoalan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sepanjang kehidupan kerja. Rendahnya partisipasi dalam pendidikan nonformal menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum banyak memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan atau pembelajaran terstruktur di luar pendidikan formal.

Nelayan menurut Tingkat Pendidikan Non-Formal yang Diikuti



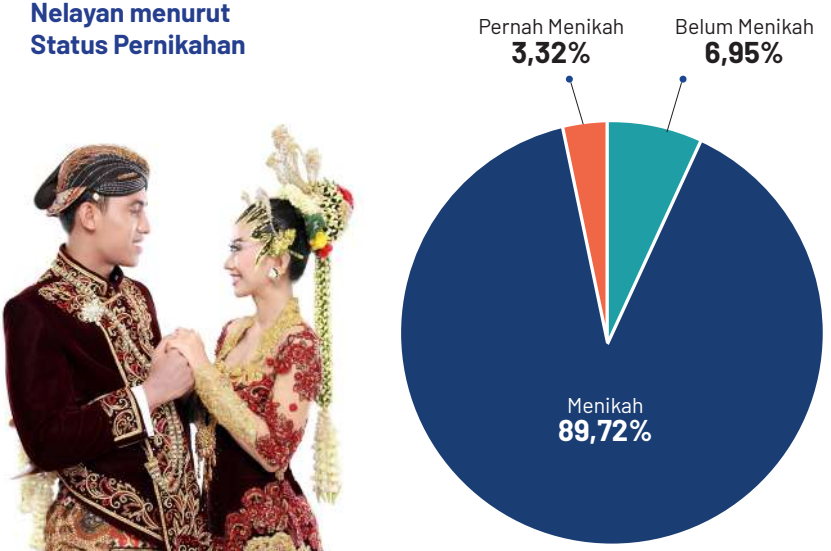


Ilustrasi AI

2.4. Status Pernikahan

Hasil survei menunjukkan bahwa 89,72% responden berstatus menikah, 6,95% belum menikah, dan 3,32% berstatus pernah menikah (duda/janda). Dominannya responden yang berstatus menikah menunjukkan bahwa kehidupan sebagian besar nelayan dalam survei tidak terlepas dari dinamika rumah tangga. Kondisi nelayan sebagai individu juga berkaitan erat dengan kondisi keluarga, baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam pengelolaan sumber penghidupan. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan temuan bahwa 371 responden (22,83%) memiliki pihak lain yang menjadi tanggungan di luar tanggungan keluarga inti.

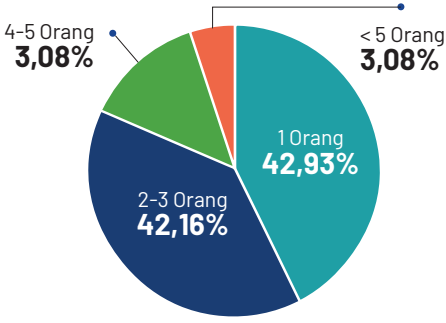
Nelayan menurut Status Pernikahan



© Ferli Achirulli/123RF

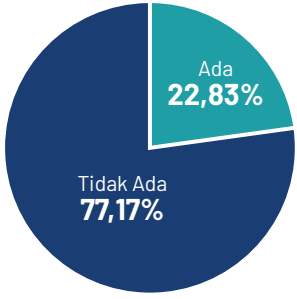
Dari responden yang tercatat memiliki tanggungan tersebut, sebagian besar menanggung satu orang (42,93%) atau dua hingga tiga orang (42,16%). Sementara itu, 11,83% responden memiliki empat hingga lima orang tanggungan dan 3,08% lainnya menanggung lebih dari lima orang. Temuan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab ekonomi nelayan tidak selalu terbatas pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keluarga inti, tetapi juga dapat mencakup anggota keluarga atau pihak lain yang bergantung pada penghasilannya. Dengan demikian, jumlah tanggungan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam memahami beban ekonomi dan kebutuhan rumah tangga nelayan.

Nelayan menurut Jumlah Anggota Keluarga



Nelayan menurut Keberadaan Pihak di Luar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan*

*seperti orang tua, mertua, kakak/adik, keponakan, dan lainnya



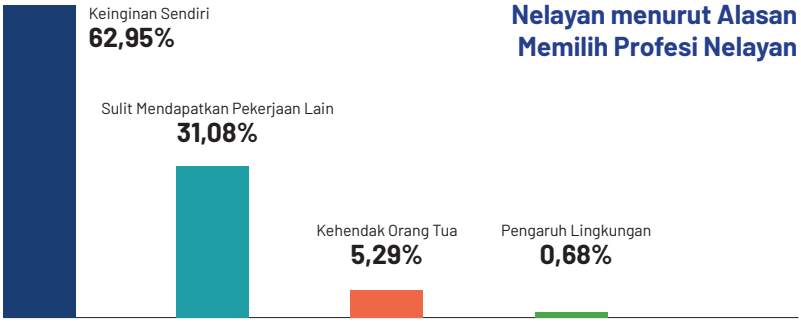
Karakteristik tersebut memperkuat pentingnya menggunakan rumah tangga sebagai salah satu unit analisis dalam memahami kesejahteraan nelayan. Pendapatan dari kegiatan penangkapan ikan, pekerjaan sampingan, keterlibatan istri, jumlah tanggungan, serta akses terhadap sumber daya dapat saling berhubungan dalam menentukan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, ukuran kesejahteraan nelayan yang hanya berfokus pada pendapatan individu berpotensi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kehidupan mereka. Besaran pendapatan yang sama belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang setara, terutama ketika jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, sumber pendapatan, dan kontribusi ekonomi anggota rumah tangga berbeda.

Temuan ini menjadi salah satu dasar penting untuk pembahasan mengenai kualitas rumah tangga, kerentanan, dan resiliensi pada bagian berikutnya. Selain itu, karakteristik rumah tangga juga perlu dibaca bersama dengan dinamika usia dan pengalaman kerja nelayan untuk memahami keberlanjutan profesi ini. Jika sebagian besar nelayan telah menjalani profesinya selama puluhan tahun, sementara proporsi nelayan muda relatif kecil, maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana pengetahuan dan praktik perikanan diteruskan kepada generasi berikutnya. Proses regenerasi nelayan tidak hanya berkaitan dengan minat generasi muda untuk memasuki sektor perikanan, tetapi juga dengan bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang berkembang di tingkat

keluarga maupun komunitas dapat diwariskan. Sebaliknya, nelayan muda yang memasuki profesi ini tanpa melalui proses pewarisan pengetahuan dari keluarga atau komunitas mungkin memiliki pengalaman dan cara pandang yang berbeda dalam menjalankan kegiatan perikanan.

2.5. Alasan Menjadi Nelayan

Setiap nelayan memiliki alasan yang melatarbelakangi pilihannya untuk menjadi nelayan. Pilihan tersebut dapat muncul dari keinginan pribadi, kondisi pekerjaan yang tersedia, dorongan dari keluarga, maupun lingkungan tempat mereka tinggal. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei, sebanyak 62,95% nelayan memilih profesi tersebut atas dasar keinginan sendiri. Sementara itu, 31,08% nelayan memilih menjadi nelayan karena sulit mendapatkan pekerjaan lain. Selain kedua alasan tersebut, 5,29% nelayan menyatakan bahwa mereka mengikuti kehendak orang tua dalam memilih profesi. Sisanya sebanyak 0,68% memilih menjadi nelayan karena pengaruh lingkungan.



Dominannya alasan "keinginan sendiri" menunjukkan bahwa profesi nelayan tidak tepat dipahami semata-mata sebagai pekerjaan yang dipilih karena tidak adanya alternatif. Sebagian besar responden justru menyatakan adanya pilihan atau preferensi personal terhadap profesi tersebut. Namun, pada saat yang sama, hampir sepertiga responden menjadi nelayan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan lain. Kedua temuan ini perlu dibaca secara bersamaan. Pilihan menjadi nelayan berada di antara preferensi individual dan struktur kesempatan kerja.

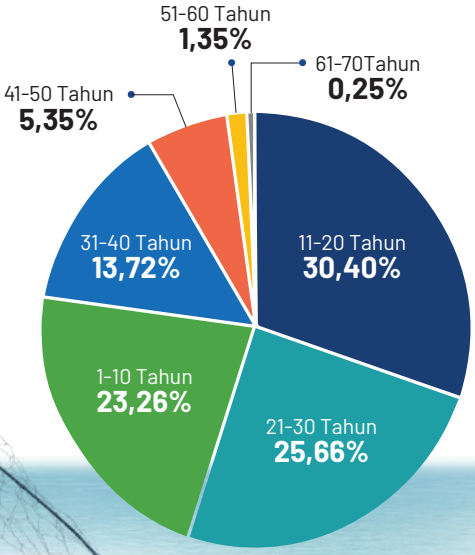
Seseorang dapat memilih menjadi nelayan karena menyukai atau terbiasa dengan pekerjaan tersebut, tetapi pilihan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja lain di wilayah tempat tinggalnya. Dalam konteks masyarakat pesisir, kedua faktor tersebut bahkan dapat berjalan bersamaan: profesi nelayan dapat menjadi pekerjaan yang dipilih sekaligus pekerjaan yang paling tersedia dan dapat diwariskan melalui pengalaman keluarga.

Temuan mengenai alasan menjadi nelayan juga penting untuk membaca isu regenerasi. Jika generasi muda tidak tertarik menjadi nelayan, persoalannya tidak cukup dijelaskan oleh "kurangnya minat". Sebaliknya, perlu dilihat kondisi pekerjaan yang mereka hadapi, termasuk pendapatan, keselamatan kerja, akses terhadap kapal dan alat tangkap, kepastian usaha, kondisi sumber daya ikan, serta terhadap peluang pekerjaan lain.

2.6. Lama Menjadi Nelayan

Berdasarkan data survei, masa kerja nelayan menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebanyak 30,40% responden telah menjadi nelayan selama 11-20 tahun, 25,66% selama 21-30 tahun, dan 23,26% selama 1-10 tahun. Selanjutnya, 13,72% telah menekuni profesinya selama 31-40 tahun, 5,35% selama 41-50 tahun, 1,35% selama 51-60 tahun, dan 0,25% selama 61-70 tahun. Dengan demikian, sebanyak 40,53% responden,telah menjadi nelayan selama lebih dari 20 tahun, sementara 37,54% responden telah menekuni profesinya selama lebih dari 30 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa profesi nelayan bagi sebagian responden bukan merupakan pekerjaan sementara, melainkan pekerjaan yang telah dijalani waktu yang panjang.

Nelayan menurut Lamanya Waktu Menggeluti Profesi Nelayan





© Yusuf Wahil/AP Photo

Panjang masa kerja tersebut dapat menunjukkan adanya akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang terbentuk melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan perikanan. Pengetahuan mengenai cuaca dan musim, kondisi laut, lokasi penangkapan, perubahan sumber daya, penggunaan alat tangkap, hingga hubungan dengan pelaku pasar dapat berkembang melalui pengalaman yang panjang.

Namun, data lama menjadi nelayan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kondisi penghidupan mereka lebih baik. Pengalaman yang panjang dan kesejahteraan merupakan dua hal yang berbeda. Panjangnya masa kerja perlu dibaca bersama dengan usia, pendapatan, kepemilikan aset, kondisi usaha, dan ketergantungan terhadap kegiatan penangkapan ikan. Seorang nelayan dapat memiliki pengalaman puluhan tahun tetapi tetap menghadapi keterbatasan modal, fluktuasi hasil tangkapan, risiko keselamatan, atau ketidakpastian pasar

2.7. Refleksi

Profil individu menunjukkan bahwa nelayan dalam survei ini bukan kelompok yang homogen. Beberapa temuan utama memperlihatkan dimensi yang perlu diperhatikan dalam memahami kehidupan dan penghidupan nelayan.

Ketika seorang nelayan berlayar membawa harapan, keluarganya tinggal di darat menjaga doa. Di antara keduanya, kehidupan pesisir terus bertahan dari generasi ke generasi.



BAB TIGA:

3 Dari Laut Hingga ke Meja Makan: Kegiatan Penangkapan dan Pemasaran Ikan



© BIDUK Indonesia

"Perjalanan ikan tidak berhenti ketika hasil tangkapan didaratkan. Kegiatan penangkapan, penanganan, pengolahan, dan pemasaran membentuk rantai nilai yang turut menentukan pendapatan dan posisi tawar nelayan".

Selama bertahun-tahun, masyarakat nelayan kerap dipandang sebagai kelompok yang seragam, identik dengan kehidupan sederhana, kerja keras, dan keterbatasan ekonomi. Padahal, kehidupan masyarakat pesisir memiliki keragaman peran dan kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih kompleks. Dalam aktivitas perikanan, terdapat pemilik kapal yang menyediakan modal dan sarana penangkapan, juragan yang memimpin serta mengatur kegiatan melaut, hingga Anak Buah Kapal (ABK) yang terlibat langsung dalam proses penangkapan ikan dengan sistem pembagian hasil.

Dari sisi mata pencaharian, terdapat pula nelayan penuh yang sepenuhnya menggantungkan penghidupan pada hasil laut, serta nelayan sambilan yang menjalankan pekerjaan lain di luar kegiatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa nelayan bukanlah kelompok sosial ekonomi yang tunggal, melainkan masyarakat dengan pembagian peran, tanggung jawab, dan sumber penghidupan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam membentuk kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Setelah menguraikan definisi nelayan dan karakteristik individu yang tercakup dalam survei, bagian berikutnya membahas kegiatan yang menjadi inti profesi nelayan, yaitu penangkapan ikan. Mengingat hampir seluruh responden dalam survei merupakan nelayan kecil, pembahasan pada bagian ini menggunakan pengertian nelayan kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 1 diatas, peraturan perundang-undangan mendefinisikan antara lain berdasarkan kegiatan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[62]

Dengan demikian, memahami kehidupan nelayan tidak cukup hanya dengan mengetahui latar belakang individu yang menjalani profesi tersebut, tetapi juga perlu melihat bagaimana kegiatan penangkapan dilakukan dan kondisi yang mempengaruhinya Undang-Undang Perikanan mendefinisikan kegiatan perikanan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.[63] Definisi ini menempatkan kegiatan penangkapan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perikanan yang saling berkaitan, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami usaha penangkapan

[61] UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

[63] UU Perikanan 2004 Jo, 2009, jo. UU CK.

dan kondisi kehidupan nelayan, kegiatan tersebut perlu dilihat dalam konteks sistem perikanan yang lebih luas.

Setiap tahapan saling berkaitan dan mempengaruhi nilai serta manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari sumber daya ikan. Namun, untuk memahami profil nelayan secara utuh, rangkaian tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka *fisheries system*,[64] yakni sistem perikanan yang mencakup keterkaitan antara kegiatan produksi, sumber daya alam, kondisi sosial-ekonomi, kelembagaan, dan tata kelola.

Dalam praktiknya, pelaksanaan usaha penangkapan ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Kapal dan alat tangkap menentukan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan, tetapi kemampuan tersebut juga bergantung pada ketersediaan modal, biaya operasional, akses terhadap bahan bakar, pengetahuan dan keterampilan, kondisi cuaca dan laut, serta ketersediaan sumber daya ikan. Di sisi lain, hubungan kerja di atas kapal, akses terhadap informasi dan wilayah penangkapan, serta hubungan dengan pedagang atau pengepul/tengkulak (di beberapa wilayah dikenal dengan *bakul*,[65] atau *papalele)*[66] turut mempengaruhi keputusan melaut,

[64] Kerangka sistem perikanan memandang kegiatan penangkapan sebagai bagian dari sistem yang melibatkan interaksi antara ekosistem, kegiatan produksi, aktor dan relasi sosial-ekonomi, rantai nilai, serta pengaturan kelembagaan. Dalam kerangka ini, perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi komponen lainnya. Sebagai contoh, perubahan ketersediaan ikan dapat meningkatkan waktu dan biaya melaut, sedangkan keterbatasan modal dapat membatasi kemampuan nelayan untuk menjangkau wilayah penangkapan yang lebih jauh. Kerangka ini digunakan sebagai pendekatan analitis untuk membaca keterkaitan antarkomponen, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh hubungan tersebut dapat diuji menggunakan data survei ini.

[65] Nurdien H. Kistanto, Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pesisir: Nelayan dan Bakul Ikan di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang (2019).

[66] Kissiya, E. Papalele: Suatu tinjauan Historis Terhadap Budaya Masyarakat SOCIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 9(1). https://doi.org/10.21831/socia.v11i1.3732

hasil yang diperoleh, dan manfaat ekonomi yang diterima nelayan. Dengan demikian, hasil usaha penangkapan tidak hanya ditentukan oleh jumlah ikan yang berhasil ditangkap, tetapi juga oleh kondisi yang memungkinkan nelayan menjalankan kegiatan tersebut dan memperoleh manfaat dari hasil tangkapannya.

Bab ini membahas kegiatan usaha penangkapan berdasarkan data survei, mulai dari karakteristik sarana produksi dan pelaksanaan kegiatan penangkapan hingga hasil tangkapan dan pemasaran. Pembahasan juga memperhatikan keterbatasan data yang tersedia dalam menggambarkan keterkaitan antarkomponen sistem perikanan. Dengan pendekatan ini, data mengenai kegiatan penangkapan tidak hanya dibaca sebagai gambaran teknis kegiatan nelayan, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk memahami kondisi yang membentuk keberlangsungan usaha dan penghidupan mereka.

3.1. Pengetahuan dan Keahlian Aktivitas Penangkapan

Kegiatan penangkapan tidak hanya bergantung pada kapal, alat tangkap, maupun permodalan, tetapi juga pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki nelayan dalam mengoperasikan seluruh sarana tersebut. Nelayan perlu memahami cara menggunakan alat tangkap, cara mengoperasikan kapal, cara membaca kondisi laut dan menyesuaikan dengan cuaca serta kondisi lingkungan, serta menentukan strategi penangkapan berdasarkan keberadaan dan pola sebaran ikan. Karena itu, pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari modal produksi nelayan, meskipun sebagian besar tidak diperoleh melalui pendidikan formal. Umumnya, nelayan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk melaut dan melakukan aktivitas penangkapan melalui kombinasi pengalaman langsung, pembelajaran antargenerasi, serta pengamatan terhadap lingkungan laut.

Dari sisi pendidikan formal, tingkat pendidikan nelayan relatif terbatas. Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir di jenjang sekolah dasar (SD) atau sederajat (39,14%), sementara 20,92% responden memiliki pendidikan terakhir pada jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat, dan 20,06% pada jenjang sekolah menengah atas. 15,82% dari responden tidak tamat SD. Hanya sebagian kecil yang tidak sekolah (3,08%) atau memiliki pendidikan terakhir perguruan tinggi atau sederajat (0,98%).

Namun, tingkat pendidikan formal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki nelayan. Survei menunjukkan bahwa mayoritas nelayan memiliki berbagai jenis keterampilan, termasuk perawatan dan perbaikan alat tangkap (77,78%), mengendarai perahu atau kapal (64,80%), membuat alat tangkap (64,49%), serta perawatan dan perbaikan perahu atau kapal (44,18%). Mayoritas nelayan menguasai lebih dari satu jenis keterampilan pendukung kegiatan menangkap (66,95%).

Pengetahuan tersebut tidak selalu diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi berkembang melalui praktik dan pengalaman yang berlangsung secara terus-menerus. Hal tersebut terlihat dari pendidikan informal yang diikuti, seperti pelatihan (10,40%), serta kemampuan mereka dalam menggunakan lebih dari satu jenis alat tangkap. Sebagaimana tercermin dalam survei, sekitar 30,83% dari responden menggunakan 2-4 jenis alat tangkap untuk melaut. Hal ini menunjukkan adanya pengetahuan dan keterampilan untuk menyesuaikan metode penangkapan dengan jenis ikan, musim dan kondisi perairan. Keterampilan dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman melaut. Sebanyak 30,40% dari responden telah bekerja sebagai nelayan selama 11-20 tahun. 25,66% telah bekerja selama 21-30 tahun, dan 13,72% selama 31-40 tahun. Dengan demikian, pendidikan formal tidak serta-merta menunjukkan keterbatasan kapasitas nelayan, karena terdapat pengetahuan dan keterampilan yang dibentuk melalui berbagai bentuk pembelajaran di luar sistem pendidikan formal.

3.2. Perahu dan Alat Tangkap

Jenis kapal dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tidak hanya berpengaruh pada target penangkapan dan daerah menangkap, tetapi juga sistem pembagian hasil, serta akses nelayan terhadap bantuan dan sumber daya.

Berdasarkan survei, mayoritas nelayan menggunakan perahu motor tempel milik sendiri (43,32%). Sebanyak 28,86% orang tidak memiliki kapal sendiri atau menaiki kapal milik orang lain. Selain itu, sekitar 10% orang memiliki perahu tanpa motor milik sendiri, dan 17,78% menggunakan kapal motor milik sendiri. Mayoritas nelayan, sebanyak 80,99%, memiliki kapal berukuran kurang dari 5 GT. Survei menunjukkan juga bahwa nelayan paling sedikit memiliki kapal berukuran di atas 30 GT (0,55%). Selain itu, sekitar 12% nelayan menggunakan kapal berukuran 6-10 GT, 4,26% menggunakan kapal berukuran 11-23 GT, serta 2,05% menggunakan kapal berukuran 24-29 GT.

Berdasarkan jenis dan ukuran kapal yang digunakan oleh para nelayan yang relatif kecil (5-10 GT), mereka memiliki kapasitas untuk melaut di bawah 12 mil. Hal ini terverifikasi oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa 47,44% nelayan melaut di 0-4 mil laut dan 21,93% melaut di 5-12 mil. Hanya 11,30% melaut di 13-24 mil di laut, 12,72% di 25-50 mil laut, dan 2,35% di atas 100 mil laut.

Pada dasarnya, setiap ukuran kapal memiliki formasi atau struktur operasi yang berbeda-beda. Kapal dengan ukuran 1-10 GT contohnya, secara umum dikerahkan oleh 1-2 nelayan, di mana tidak ada pembagian kerja yang kaku, dan biasanya beroperasi selama satu hari saja *(one day fishing)*.[67] Sedangkan kapal-kapal dengan ukuran 10 GT ke atas dikerahkan oleh 3-6 nelayan dengan pembagian tugas yang lebih jelas, dan biasanya beroperasi selama 1-5 hari *(multi-day fishing)*.[68] Kapal-kapal dengan ukuran 30 GT ke atas umumnya dikerahkan oleh 15-30 nelayan dengan pembagian tugas yang ketat, dan umumnya beroperasi selama berminggu-minggu atau sampai satu bulan (*trip* panjang).[69]

[67] Presentasi Prof. Dedi Adhuri.

[68] *Ibid.*

[69] *Ibid.*

Pembagian kerja dan struktur pekerjaan di atas kapal seperti berikut kemudian berdampak pada sistem pembagian hasil, serta kondisi sosial dan ekonomi setiap nelayan. Kapal-kapal dengan ukuran 1-10 GT biasanya membutuhkan kebutuhan modal yang lebih relatif rendah dan terjangkau bagi nelayan, atau dapat dipenuhi dengan bantuan eksternal yang sedikit. Sistem bagi hasil antara nelayan juga tidak mengikat. Oleh karena itu, terdapat tingkat ketergantungan yang rendah pada produksi dan pemasaran, karena hasil tangkapan relatif rendah dan dapat ditangani sendiri oleh nelayan dan keluarganya.[70] Sedangkan, kapal-kapal di atas 10 GT membutuhkan investasi lebih besar, sehingga membutuhkan dukungan eksternal (seperti BBM subsidi atau bantuan lainnya) dan sistem pembagian hasil yang jelas antar nelayan yang bekerja di atas kapal. Oleh karena struktur pembagian kerja tersebut, terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap seorang atasan/pemberi kerja dan juga pihak seperti tengkulak, baik untuk produksi maupun pemasaran.[71]

[70] *Ibid.*

[71] *Ibid.*

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden mengerahkan kapal sendiri (47,45%). 35,38% nelayan melaut bersama satu atau dua orang lain. Sedangkan, 11,6% nelayan melaut bersama 3-6 orang, dan hanya 5,54% melaut bersama lebih dari enam orang. Sebagian besar responden melaut bersama nelayan yang sama dan sudah lama (50,16%), sementara 40,67% kadang berganti orang. Hanya sebagian kecil yang sering berganti rekan melaut (7,53%) atau melaut bersama keluarga (1,64%). Data tersebut menunjukkan struktur kelompok kerja yang relatif tetap dengan keterlibatan keluarga yang terbatas. Struktur kerja tersebut mengindikasikan pekerjaan yang bersifat relatif mandiri, dan bergantung pada hubungan kerja yang berbasis kepercayaan.

Alat tangkap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kapal. Pengoperasian alat tangkap berpengaruh pada berbagai aspek dari aktivitas penangkapan ikan, seperti target tangkapan ikan, pola pekerjaan di atas kapal, dan wilayah tangkap nelayan. Sebaliknya, penggunaan jenis alat tangkap tertentu dapat didasarkan pada keahlian nelayan dan input usaha lainnya. Contohnya, alat tangkap seperti jala dan pukat membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak karena ukuran dan beratnya relatif besar. Oleh karena itu, alat tangkap tersebut umumnya digunakan pada kapal berukuran lebih besar. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penggunaan kapal yang lebih besar cenderung membentuk pola kerja dengan pembagian tugas dan pembagian hasil yang lebih terstruktur. Selain itu, penggunaan alat tangkap berpengaruh pada strategi pelaksanaan aktivitas penangkapan ikan. Contohnya, jaring hela digunakan oleh nelayan karena mampu menangkap ikan dalam jumlah besar dan dengan relatif efisien, serta memiliki jangkauan operasi lebih luas.[72] Penggunaan alat tangkap tersebut dapat dengan lebih cepat memenuhi kebutuhan harian. Sedangkan, nelayan yang menggunakan diversifikasi alat tangkap seperti rawai dan bubu memungkinkan nelayan untuk menangkap komoditas bernilai tinggi, meskipun skala pendapatan lebih kecil.[73]

[72] Alfian, et al., "Perbandingan Pendapatan dan Hasil Tangkapan Nelayan Kecil Berdasarkan Alat Tangkap di Desa Sungai Kupah Kubu Raya," Jurnal Akuatiklestari 9, no. 2 (2026): Hlmn. 202 dan 204.

[73] *Ibid.*, Hlmn. 204.

Jenis dan pilihan alat tangkap memengaruhi akses nelayan terhadap bantuan pemerintah dan sumber permodalan. Contohnya, berdasarkan satu penelitian, bantuan alat tangkap *gillne*t oleh KKP kepada nelayan di Kecamatan Kuala Jambi memberikan dampak kenaikan terhadap penerimaan nelayan.[74] Maka dari itu, diversifikasi peralatan alat tangkap dan keberagaman keterampilan penggunaan dapat menentukan penyaluran bantuan kapal dan alat tangkap, terutama untuk menggunakan metode yang berkelanjutan.

Hasil survei menunjukkan bahwa ada tiga alat tangkap yang mayoritas digunakan oleh nelayan kecil, yaitu: jaring (42,95%), pancing (31,51%), dan pukat (16,49%).

[74] Lora Intana Putri, et al., "Dampak Bantuan Alat Tangkap Gillnet Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur," Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan 5, no. 2 (Desember 2021).

3.3. Modal dan Input Usaha, dan Pengaruhnya pada Usaha Penangkapan

Hasil *profiling* terhadap 1.625 nelayan menunjukan bahwa usaha penangkapan memiliki tingkat ketidakpastian penerimaan yang tinggi. Pada kondisi pendapatan terendah, xx% nelayan tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Sebanyak xx% memperoleh kurang dari Rp25.000 per trip, xx% memperoleh Rp25.000-Rp50.000, dan xx% memperoleh Rp50.000-Rp100.000. Sebaliknya, pada kondisi pendapatan tertinggi, xx% nelayan memperoleh Rp250.000-Rp500.000 per trip, xx% memperoleh Rp500.000-Rp1 juta, dan xx% memperoleh Rp1-2,5 juta. Bahkan, xx% pernah memperoleh lebih dari Rp2,5 juta dalam satu trip. Rentang yang lebar antara pendapatan terendah dan tertinggi ini menunjukkan bahwa penerimaan nelayan sangat bergantung pada kondisi tiap *trip.* Karena itu, tingkat pendapatan nelayan perlu dilihat bersama biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan tangkapan.

Ketidakpastian penerimaan tersebut berlangsung bersamaan dengan tingginya kebutuhan input. Rata-rata biaya operasional mencapai xx per trip, dengan BBM sebagai komponen terbesar (xx% atau Rpxx), diikuti dengan perbekalan/logistik sebesar xx%, upah awak xx%, dan biaya lainnya xx%. Hanya xx% responden yang dapat melaut tanpa biaya operasional. Artinya, hampir seluruh nelayan harus menanggung biaya di muka sebelum mengetahui apakah *trip* tersebut akan menghasilkan tangkapan. Pada kelompok yang pendapatan terendahnya Rp0, trip yang gagal tidak hanya berarti tidak ada pemasukan, tetapi juga kerugian sebesar biaya yang sudah dikeluarkan.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA





INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE